

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

LOKA POM DI KOTA
LUBUKLINGGAU



JL. YOS SUDARSO NO 9C KEL. WATERVANG KEC.
LUBUKLINGGAU TIMUR I KOTA LUBUKLINGGAU

lubuklinggau.pom.go.id

loka_lubuklinggau@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Triwulan III tahun 2025 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM, Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan pertama sampai dengan bulan September 2025. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selalu berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan. Kendala utama pada Tahun 2025 ini adalah pemblokiran anggaran sesuai intruksi presiden nomor 1 tahun 2025, meningkatnya beban kerja serta bertambah nya *catchment* area pengawasan serta kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, 20 Oktober 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja TW III Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran kegiatan pada TW III Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Badan POM yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Telah ditetapkan 8 sasaran kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2025 harus mencapai 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, lalu setiap TW dilakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Selama TW III tahun 2025 diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

Pada TW III Tahun 2025, terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan dengan predikat Istimewa, 1 (satu) sasaran kegiatan dengan predikat Baik dan 1 (satu) sasaran kegiatan yang belum dapat dinilai di TW III. Adapun rincian hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tahun 2025, yaitu :

1. sasaran kegiatan target pertama yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **103,87%** dan predikat “**Istimewa**”. Hasil tersebut didapat dari 8 (delapan) indikator dengan kategori “**Sangat Baik**”, 2 (dua) indikator dengan kategori “**Baik**”, 1 (satu) indikator dengan kategori “**Cukup**” dan 2 (dua) indikator kategori yang belum dapat dihitung di TW II. Hasil tersebut didapat dari capaian 13 (tiga belas) indikator dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 8 (delapan) indikator kategori **“Sangat Baik”** yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **100,73%**, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **104,20%**, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **109,89%**, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **107,35%**, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **109,89%**, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian **109,79%** dan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian **105,16%**. Selain itu terdapat 1 (satu) indikator diantaranya dilakukan normalisasi capaian sesuai dengan Surat Edaran Nomor. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 dimana indikator dengan capaian >110,00% dilakukan normalisasi yaitu untuk indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **110,00%** (sebelum normalisasi capaian 116,38%).
(sebelum normalisasi capaian 110,93%), Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **110,00%** (sebelum normalisasi capaian 117,65%), Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **110,00%** (sebelum normalisasi capaian 117,65%) dan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian **110,00%** (sebelum normalisasi capaian 111,64%).
- 2 (dua) indikator kategori **“Baik”** yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian **100,00%** dan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian **100,00%**.
- 1 (satu) indikator kategori **“Cukup”** yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian **85,57%**. Hal

ini dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan Loka POM di Kota Lubuk Linggau, sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu melakukan bimbingan teknis tentang penyusunan *corrective action and preventif action* atau tindakan perbaikan dan pencegahan kepada pelaku usaha fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan pada bulan september 2025 dan sebagai langkah antisipatif akan dilakukan edukasi kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- 2 (dua) indikator belum dapat dihitung di TW IIL karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dan Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
2. sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **100,93%** dan predikat “**Istimewa**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 3 (tiga) indikator dengan kategori “**Baik**” dan 1 (satu) indikator dengan kategori “**Sangat Baik**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- 1 (satu) indikator kategori “**Sangat Baik**” yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian **103,73%**.
 - 3 (tiga) indikator kategori “**Baik**” yaitu Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian **100,00%**, Jumlah desa pangan aman dengan capaian **100,00%**, Jumlah desa pangan aman dengan capaian **100,00%** dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian **100,00%**.
3. sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **110,00%** dengan predikat “**Istimewa**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan yang dilakukan normalisasi capaian sesuai dengan Surat Edaran Nomor. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025

dimana indikator dengan capaian >110,00% sehingga capaian menjadi **110,00%** (sebelum normalisasi capaian 116,38%).

4. sasaran kegiatan keempat yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **110,00%** dengan predikat “**Istimewa**”.
5. sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **100,00%** dengan predikat “**Baik**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kategori “**Baik**” yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian **100,00%**.
6. sasaran kegiatan keenam yaitu Layanan Publik UPT yang prima” dengan 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT yang belum dapat dihitung di TW III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV.
7. sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **101,59%** dengan predikat “**Istimewa**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) indikator dengan kategori “**Sangat Baik**” dan 1 (satu) indikator kategori yang belum dapat dihitung di TW III. Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (empat) Indikator sebagai berikut :
 - 1 (satu) indikator kategori “**Sangat Baik**” yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT dengan capaian **104,76%**.
 - 3 (tiga) indikator belum dapat dihitung di TW III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV yaitu Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada TW III tahun 2025 sebesar **52,20%** yaitu **Rp. 1.926.011.724,-** dari **Rp. 3.688.411.000,-**. Anggaran Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) sasaran kegiatan. Terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp. 938.831.000 sehingga capaian realisasai anggaran kegiatan pada TW III tahun 2025 diluar anggaran yang

dilakukan pemblokiran yaitu 70,05% yaitu Rp. 1.926.011.724,- dari Rp. 2.749.580.000,-.

Berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-063.01.2.672851/2025 yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau secara mandiri mengelolah anggaran pada tahun 2025, dengan besaran anggaran Rp. 3.688.411.000,- dengan komposisi anggaran belanja pegawai Rp.1.212.395.000,- (32,87%), belanja barang Rp. 2.379.916.000,- (64,52%) dan belanja modal Rp. 96.100.000,- (2,61%). Sampai dengan Triwulan III Loka POM di Kota Lubuklinggau telah terdapat 8 (delapan) kali revisi DIPA, yaitu sebagai berikut :

- a. Revisi I DIPA pada DJA tanggal 18 Februari 2025 dalam rangka Pemblokiran anggaran sesuai inpres 1 tahun 2025.
- b. Revisi II DIPA pada DJA tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka revisi Penambahan anggaran ppnpn TA 2025
- c. Revisi III DIPA pada DJA tanggal 27 Maret 2025 dalam rangka Relaksasi (pembukaan) blokir anggaran.
- d. Revisi IV DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 April 2025 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA
- e. Revisi ke V pada DJA tanggal 01 Juli 2025 dalam rangka revisi anggaran atas belanja pegawai dan belanja operasional CASN TA 2025
- f. Revisi ke VI pada DJPB tanggal 11 Juli 2025 dalam rangka update halaman III DIPA
- g. Revisi ke VII pada kewenangan KPA tanggal 11 Agustus 2025 dalam rangka revisi POK
- h. Revisi ke VIII pada kewenangan KPA tanggal 11 September 2025 dalam rangka revisi POK

Adapun rincian realisasi sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	Rp.1.212.395.000,-	Rp. 896.159.564,-	52,20%
Belanja Barang	Rp. 2.379.916.000,-	Rp. 1.029.852.160,-	73,90%
Belanja Modal	Rp. 96.100.000,-	-	-
Total	Rp. 3.688.411.000,-	Rp. 1.926.011.724,-	52,20%

Tabel 1 Realisasi anggaran per jenis belanja s.d triwulan III tahun 2025

HIGHLIGHT TW III 2025

1. Sinergi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam Kegiatan Pelatihan SPPI Batch 3 di Kabupaten Lahat

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Lubuklinggau bersama Balai Besar POM di Palembang turut berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 yang dilaksanakan pada tanggal 2–3 Juli 2025 bertempat di Dodikjur Rindam II Sriwijaya. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mencetak generasi muda yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengawal berbagai program prioritas nasional, khususnya Program Nasional Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Kehadiran Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Balai Besar POM di Palembang dalam kegiatan ini mencerminkan sinergi antara lembaga pengawas obat dan makanan dengan program strategis pembangunan nasional. Diharapkan, melalui pelatihan ini, para peserta dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat serta mengawal implementasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis secara optimal.



2. Kegiatan Narasumber kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMP Xaverius Kota Lubuklinggau

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si., Apt. Menghadiri Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus menjadi narasumber dengan tema Makanan Sehat dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru di SMP Xaverius Kota Lubuklinggau.



3. Koordinasi Kabupaten/Kota Pangan Aman, AMR dan Pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM

Rabu, 16 Juli 2025 — Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama tim melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait program Kabupaten/Kota Pangan Aman, pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR), serta pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM tahun 2025. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, Ir. H. Trisko Defriansyah, ST., M.Si menyatakan dukungan penuh dan komitmen terhadap penilaian Kabupaten Pangan Aman tahun ini. Beliau juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung

seluruh kegiatan Loka POM, termasuk upaya pengendalian resistensi antimikroba di wilayah Kota Lubuklinggau.



4. Sinergi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam Kegiatan Pelatihan SPPI Batch 3 di Martapura

Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama Balai Besar POM di Palembang, Balai POM di Lampung, dan Balai POM Tulang Bawang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional melalui pengawalan Program Nasional Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 950 (sembilan ratus lima puluh) peserta yang diberikan materi berupa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ING (Informasi Nilai Gizi), Ketertelusuran dalam Monitoring Pengendalian Proses Produksi (Traceability), dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang kompeten dalam mendukung implementasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis serta

meningkatkan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman dan bergizi.



5. Loka POM di Kota Lubuklinggau Hadir di Posyandu Kecamatan Marga Mulya Kota Lubuklinggau

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan stunting, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan drive thru edukasi keliling (Darling) di Posyandu Marga Mulya pada hari senin, 17 juli 2025. Masyarakat mendapatkan edukasi langsung mengenai pentingnya memilih dan mengolah pangan yang aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua, khususnya ibu balita, tentang pentingnya gizi seimbang dan keamanan pangan sebagai langkah konkret pencegahan stunting sejak dini. Dengan kolaborasi bersama kader posyandu dan dukungan masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat

memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat.



6. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bersama Universitas PGRI Silampari dan Loka POM di Kota Lubuklinggau

Selasa 22 Juli 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama Universitas PGRI Silampari resmi menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di ruang rapat gedung Rektorat Universitas PGRI Silampari.





7. Monitoring Pemberdayaan Kader dan Sertifikasi SAPA Sekolah di SMKN 3 Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Audit Kantin Sekolah dalam rangka sertifikasi Piagam Bintang di SMKN 3 Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kantin sekolah telah menerapkan prinsip Keamanan Pangan demi mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan aman. Semoga semakin banyak sekolah yang bisa mengikuti jejak ini dan berkomitmen menghadirkan pangan yang aman untuk peserta didik.



8. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Pada tanggal 13 Agustus 2025, Loka POM di Kota Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu tahun 2025. Program ini mencakup tiga kegiatan utama, yaitu: SAPA Sekolah (Sadar Pangan Aman di Sekolah) Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas keamanan pangan yang telah berjalan di wilayah Kota Lubuk Linggau, mengidentifikasi capaian serta tantangan, serta memperkuat sinergi antara Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman bersama dan komitmen lintas sektor dalam mendukung penguatan keamanan pangan nasional secara berkelanjutan, khususnya di lingkungan sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian penting dari mata rantai pangan masyarakat.



9. Narasumber Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau

Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau Bapak Ronny Syafri, M.Si., Apt. Menghadiri Undangan Sekaligus menjadi Narasumber pada Kegiatan yang di adakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuk Linggau pada Hari Kamis (21/08/2025) dengan Tema Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.



10. Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir di SLB Negeri Kabupaten Musi Rawas

Kami tidak hanya memastikan pangan yang beredar aman, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya memilih pangan yang sehat dan berkualitas. Langkah kecil, dampak besar! Yuk, biasakan konsumsi pangan yang AMAN, SEHAT, dan BERKUALITAS untuk masa depan yang lebih baik.



11. Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir di kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha IRTP Kabupaten Musi Rawas

Rabu (3/9/25), Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama staff hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas. Kegiatan Bimtek dibuka langsung oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Musi Rawas beserta jajarannya yang diikuti oleh 40 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah setempat. Pada pertemuan ini telah diberikan edukasi dan diskusi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk IRTP (CPPOB-IRTP) mulai dari regulasi, teknik pengolahan pangan hingga ketentuan label pangan olahan. Pengetahuan tersebut perlu dipahami pelaku usaha guna memastikan keamanan dan mutu pangan olahan yang diproduksi. Harapannya kegiatan ini mendorong UMKM Pangan Olahan di Wilayah setempat untuk secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk lokal.



12. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan advokasi ke Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan advokasi ke Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau yaitu Bp. Firdaus Abky, S.Pd.,SH.,M.Pd. Pertemuan ini membahas tentang keterlibatan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam Tim Satgas Percepatan MBG Kota Lubuklinggau serta persiapan pelaksanaan kegiatan SAPA Sekolah Tahap II yang direncanakan berlangsung pada bulan September 2025. Diharapkan sinergi antara Loka POM dan Dinas Pendidikan dapat semakin memperkuat

pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah dan juga mendukung program presiden terkait Makan Bergizi Gratis.



13. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Bimbingan Teknis untuk pelaku usaha obat bahan alam di Kota Lubuklinggau

Pada 10 September 2025, Loka POM Kota Lubuklinggau mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam (OBA)”. Acara ini dihadiri oleh pemilik dan penanggung jawab sarana distribusi OBA di wilayah Kota Lubuklinggau. Tujuan Utama dari diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pengawasan OBA, terutama yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pelaku usaha bisa lebih proaktif dalam memeriksa dan memastikan produk OBA yang beredar tidak mengandung BKO dengan memastikan produk terdaftar pada aplikasi Cek BPOM atau BPOM Mobile dan tidak masuk list produk pada public warning dengan menggunakan aplikasi e-penjelasan publik.





14. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Bimbingan Teknis upaya AMR

Senin, 22 September 2025 — Loka POM di Kota Lubuk Linggau menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Upaya Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) yang melibatkan lintas profesi dan instansi, di antaranya Apoteker, Ketua IAI, PPNI, IDI, PAFI, Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, serta Pemilik Sarana Apotek di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bapak Drs. Erwin Armeidi, M.Si, dan penyampaian materi terkait peran penting pemerintah kota Lubuk Linggau dalam pengendalian AMR. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait strategi pengendalian AMR lintas sektor oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau Bp. Ronny Syafri, M.Si., Apt, staf Loka POM di Kota Lubuk Linggau Gitta Anggrila, S.Farm., Apt. dan Muhammad Ramadhon, S.Si Melalui kolaborasi ini, diharapkan terwujud sinergi yang kuat dalam menekan laju resistensi antimikroba di tingkat daerah.





15. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Narasumber bersama Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

Kegiatan bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas kesehatan Kota Pagaralam dengan narasumber dari loka POM di Kota Lubuklinggau. Loka POM di Kota Lubuk Linggau diminta sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Kegiatan ini bertujuan memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi RTP dan penerapan CPPB IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Pemaparan langsung disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau terhadap lebih dari 50 pelaku usaha irtp di daerah Pagaralam. Dengan berlangsungnya kegiatan tersebut diharapkan menambah pemahaman bagi para pelaku usaha untuk dapat memproduksi pangan yang aman dan bermutu.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN III TAHUN 2025	viii
DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Organisasi	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.4. Isu Strategis	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025	21
2.5. Metode Pengukuran	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Sasaran Kegiatan Organisasi	29
3.1.1. Capaian Sasaran Kegiatan I	34
3.1.2. Capaian Sasaran Kegiatan II	100
3.1.3. Capaian Sasaran Kegiatan III	117
3.1.4. Capaian Sasaran Kegiatan IV	125
3.1.5. Capaian Sasaran Kegiatan V	130
3.1.6. Capaian Sasaran Kegiatan VI	138
3.1.7. Capaian Sasaran Kegiatan VII	142
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	152
3.3. Realisasi Anggaran	160
BAB IV. PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	172
4.2. SARAN	174

BAB I PENDAHULUAN

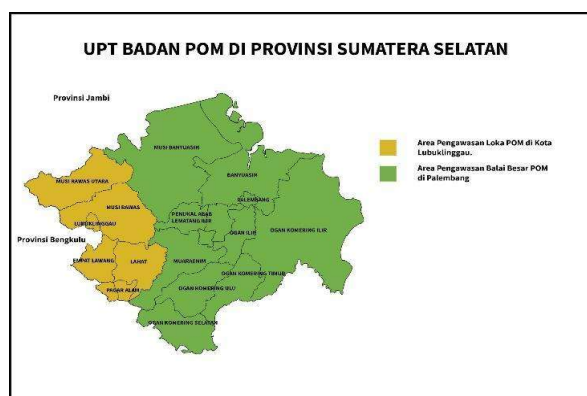
1.1. Latar Belakang Organisasi

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Pagaram.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pada 6 area wilayah Sumatera Selatan dengan balai Koordinator BBPOM di Palembang. Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Pagar Alam yang menjadi wilayah pengawasan baru di tahun 2024.



Gambar 1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 Loka POM di Kota Lubuklinggau Loka POM di Kota Lubuklinggau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau



Gambar 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 29 orang yang terdiri Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau, 18 orang ASN (15 orang PNS, 3 orang PPPK), 4 Orang CASN (CPNS), dan 7 orang tenaga outsoucing yaitu cleaning service 2 orang, satpam 3 orang dan *front office* 1 orang serta *Driver* 1 orang.

1.4. Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan

yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2025-2029.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Isu Internal

Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau menempati bangunan ruko 3 lantai dengan status sewa yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No.9C RT.03 Kel Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki fasilitas sarana, sumber penerangan PLM 23.000VA, sumber air berupa air sumur bor dan PDAM. Sarana komunikasi berupa telepon, alat-alat dokumentasi seperti kamera, proyektor, infocus, screen rool, printer, indihome dengan kecepatan 100mbps dan 50mbps, tetap diperlukan penyesuaian fasilitas sarana dan alat pengolah data diperlukan.

Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menerima hibah tanah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau di Jalan Letkol Sukirno Lubuklinggau dengan sertifikat atas nama Badan POM tanggal 9 april 2023 dengan seluas 3115 m² sehingga akan dilakukan perencanaan pembangunan gedung.

Sarana transportasi Loka POM di Kota Lubuklinggau berupa kendaraan dinas jabatan Roda 4 sebanyak 1 unit (sewa pakai), Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 1 unit (milik BMN) dan 2 (dua) unit Mobil Laboratorium keliling (milik BMN).

1.4.2 Isu Eksternal

1. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

2. Jejaring Kerja

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan langkah dalam pencapaian sasaran

sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015.

4. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

5. Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Meningkatnya pertumbuhan pada sektor industri obat dan makanan termasuk UMKM, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau lebih fokus terhadap pendampingan UMKM yang dimana seiring dengan Misi Badan POM yaitu “Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa”.

6. Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu lingkungan merupakan isu hangat yang sudah menjadi topik global sekarang ini. Lingkungan merupakan permasalahan global yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga oleh seluruh manusia. Isu lingkungan juga selalu dihubungkan dengan berbagai macam isu yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia seperti masalah

keterbatasan energi, kerusakan ekosistem, permasalahan demografis dan juga bahan makanan.

Isu perubahan iklim dan lingkungan juga merupakan salah satu tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dihadapi agar tetap menjaga keamanan obat dan makanan seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim dan lingkungan yakni terkait munculnya penyakit-penyakit baru serta ketersediaan makanan dan keamanan obat dan makanan baik dari hulu maupun ke hilir.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rancangan Rencana Strategis

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah disusun . Sasaran kegiatan disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

” Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2025 berdasarkan rancangan Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2025-2029, terdiri dari 7 Sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kegiatan, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		1.2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		1.3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
		1.4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		1.5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		1.6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		1.7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan

			ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		1.8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		1.9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		1.10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		1.11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
		1.12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
		1.13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		2.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		2.3	Jumlah desa pangan aman
		2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

6	Layanan Publik UPT yang prima	6.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	7.1	Nilai AKIP UPT
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		7.3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
		7.4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar 80,75% di tahun 2025.
2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar 85% di tahun 2025.
3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dengan target sebesar 100% di tahun 2025.
4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar 85% di tahun 2025.
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan target sebesar 91% di tahun 2025
6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar 91% di tahun 2025
7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar 90,75% di tahun 2025
8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan target sebesar 91% di tahun 2025
9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan target sebesar 90,4% di tahun 2025

10. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target sebesar 11 di tahun 2025
11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan target sebesar 80% di tahun 2025
12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan target sebesar 100% di tahun 2025
13. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan target sebesar 16,67% di tahun 2025 :

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan target sebesar 86,59% di tahun 2025.
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan target sebesar 2 di tahun 2025.
3. Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 1 di tahun 2025.
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan target sebesar 1 di tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU): Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, dengan target sebesar 8,33% di tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan target sebesar 95% di tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan target sebesar 90% di tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 6. Layanan Publik UPT yang prima

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah: Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan target 3,6 pada tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

1. Nilai AKIP UPT BPOM, dengan target 77,67% pada tahun 2025.
2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, dengan target 5 (indeks) pada tahun 2025.
3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dengan target 2,72 pada tahun 2025.

4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan target 100% pada tahun 2025.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Rencana Kinerja Tahunan disusun pada tahun 2024 (n-1). Namun pada saat penyusunan tersebut belum terdapat renstra terbaru (renstra masih dalam proses penyusunan). Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja tahun 2025 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau T.A 2025. Sasaran kegiatan dan indikator kegiatan Dokumen RKT tahun 2025 belum sesuai dengan rancangan renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau yang disusun januari 2025..

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Target
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		1.2	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		1.3	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2.	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas	2.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat	100

	sector		waktu	
3.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3.1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		3.2	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		3.3	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		3.4	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	4.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11

	kerja UPT			
5.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	5.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95
		5.2	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		5.3	Jumlah desa pangan aman	1
		5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	6.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
7.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70

	yang efektif di wilayah kerja UPT			
8.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	8.1	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
9.	Layanan Publik UPT yang Prima	9.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	10.1	Nilai AKIP UPT BPOM	76,96
		10.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		10.3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada tahun 2025 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025. Pada bulan Agustus tahun 2025 terdapat perubahan Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2025 yang memuat 7 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan. Yang mana semulanya pada awal tahun 2025 dokumen perjanjian kinerja memuat 8 sasaran kegiatan dengan 22 indikator kinerja kegiatan.

Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75
		2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91
		6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75
		8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,4
		10. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
		11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		13. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,59
		2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		3. Jumlah desa pangan aman	1
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	8,33
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	di wilayah kerja UPT			
6	Layanan Publik UPT yang prima	1.	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	1.	Nilai AKIP UPT BPOM	77,67
		2.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		3.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,72
		4.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Alokasi anggaran tahun 2025 sesuai ketentuan pada DIPA Loka POM di Kota Lubuklinggau SP DIPA- 063.01.2.672851/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. 3.586.793.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) terdiri dari :

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia Rp. 1.236.037.000,-

Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM Rp. 2.350.756.000,-.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

Pada Bulan Agustus tahun 2025, terdapat perubahan perjanjian kinerja sehingga ada perubahan target dan penambahan Indikator kinerja kegiatan pada Loka POM di Kota Lubuklinggau. Oleh karena itu terkadapt juga perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Adapun perubahan tersebut dimulai dari perhitungan capaian realisasi terhadap target pada bulan agustus 2025. Selain hal perubahan IKU dan target, terdapat juga pada beberapa IKU yang mengalami perubahan cara perhitungan pada manual IKU nya. RAPK per TW III tahun 2025 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ALOKASI ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79,5	79,5	80,75	80,75	46.622.800
		2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	85	85	21.838.950
		3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	4.910.000
		4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	21.838.950
		5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	76	91	91	18.961.050
		6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91	91	16.435.950
		7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75	91,75	90,75	90,75	53.069.500
		8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	85	85	91	91	58.487.500

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				ALOKASI ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
			ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,2	89,2	90,4	90,4	17.028.000
		10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				11	77.852.000
		11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	80	80	16.261.200
		12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				100	18.096.000
		13.	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				16,67	4.853.100
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,59	86,59	86,59	86,59	131.151.000
		2.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	75	100	2	97.985.000
		3.	Jumlah desa pangan aman	15	75	100	1	160.852.000
		4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15	75	100	1	105.332.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ALOKASI ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	60	85	8,33	12.500.000
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	27,5	50	95	104.303.000
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	43.048.000
6	Layanan Publik UPT yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	3.6	23.611.000
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota	1. Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	77.67	250.739.000
		2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	5	1.587.437.500
	Lubuklinggau yang optimal	3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	2.72	276.591.000
		4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	50	75	100	518.606.500

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM No. NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 Tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat beberapa penetapan capaian kinerja, antara lain :

2.5.a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Untuk perhitungan realisasi kinerja setiap Triwulan sesuai dengan formula perhitungan pada Manual IKU akan dijelaskan pada subbab 3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan.

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Tabel 2.5 Kategori Capaian Kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dengan Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan dan Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target tahunan adalah sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Terlampauai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$)	

Tabel 2.6 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

2.5.b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

a. NKO Periodik

NKP periodik merupakan nilai kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Loka POM di Kota Lubuklinggau diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Berikut adalah matriks perhitungan NKO Tahunan :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times (100\% - (2)) \times 100\}$
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))							
	Predikat NKO (6)							

Tabel 2.7 Matriks Perhitungan NKO

Keterangan:

- (1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja
- (2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Predikat AKIP

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

2.5.c. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa, dengan rincian sebagai berikut :

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Tabel 2.8 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2025 memuat 7 (Tujuh) sasaran kegiatan dan 25 Indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai triwulan III tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selanjutnya dilakukan analisa kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu dilakukan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya setiap indikator. Dalam evaluasi capaian kinerja triwulan III tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, pada TW III tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau memperoleh Nilai Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu **103.57% dengan predikat Istimewa**, adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	80.75	81.34	100.73 %	-	100.73%
2		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85	98.92	116.38 %	Normalisasi	110.00%
3		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang	September	100	100	100.00 %	-	100.00%

		diuji sesuai standar oleh UPT						
4		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85	88.57	104.20 %	-	104.20%
5		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	September	91	77.87	85.57 %	-	85.57%
6		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91	100	109.89 %	-	109.89%
7		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	90.75	97.42	107.35 %	-	107.35%
8		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91	100	109.89 %	-	109.89%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	September	90.4	99.25	109.79 %	-	109.79%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan	September	10.89	10.89	100.00 %	-	100.00%

		Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium						
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	September	80	84.13	105.16 %	-	105.16%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	September	0	0	0.00%	dikecualikan	
9		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	September	0	0	0.00%	dikecualikan	
11	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	September	86.59	89.82	103.73 %	-	103.73%
12		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	September	50	50	100.00 %	-	100.00%
13		Jumlah desa pangan aman	September	100	100	100.00 %	-	100.00%
14		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	September	100	100	100.00 %	-	100.00%
15	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan	September	85	95	111.76 %	Normalisasi	110.00%

	n dan mutu	olahan						
16	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	September	50	55	110.00 %	-	110.00%
17	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	September	50	50	100.00 %	-	100.00%
18	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	September	0	0	0.00%	dikecualikan	
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	September	0	0	0.00%	dikecualikan	
20		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	September	0	0	0.00%	dikecualikan	
21		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	September	0	0	0.00%	dikecualikan	
22		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	September	75	76.19	101.59 %	-	101.59%

Total Capaian PK	1967.90%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK	103.57%
Predikat NKO	Istimewa

Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama serta pencapaian NKO TW III tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat IKU yang dikecualikan dari perhitungan nilai kinerja organisasi (NKO) yaitu atas IKU yang dilakukan penilaian di akhir tahun (semua IKU yang termasuk sasaran kegiatan “Layanan Publik UPT yang Prima” dan “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal”) serta IKU “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT”.

Selain itu, perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan juga mengacu pada surat keputusan Kepala BPOM nomor 83 tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan POM serta surat edaran nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang pengukuran dan pelaporan kinerja unit/satker di lingkungan Badan POM.

Analisa akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau, sebagai berikut :

3.1.1. Capaian Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Sasaran Kegiatan ini terdapat 9 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 104.45 % dengan kategori sangat baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75	81,43	100,73	Sangat Baik 
2.	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,92	116,38	Tidak Dapat Disimpulkan 
3.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Baik 
4.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,57	104,20	Sangat Baik 
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan	91	77,87	85,57	Cukup 

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
	olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder				
6.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Sangat Baik 
7.	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	97.42	107.35	Sangat Baik 
8.	Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100.00	109.89	Sangat Baik 
9.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,40	99,25	109,79	Sangat Baik 
10.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	84,13	105,16	Sangat Baik 
11.	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai	10,89	10,89	100	Baik 

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
	standar kemampuan laboratorium				
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-
RATA – RATA NILAI SASARAN KEGIATAN (Σ NSK)				104.45	Sangat Baik 

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

Keterangan:

- A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**
- B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**
- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Strategis :

1. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
3. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
5. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Pada Tahun 2025 jumlah target sampel Obat Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling adalah 176 sampel, Sampel Sediaan Farmasi yang disampling sampai triwulan III tahun 2025 sebanyak 152 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Komoditi	Target Sampel Tahun 2025	Jumlah Sampel Yang di Sampling
1.	Obat	57	49
2.	Obat Bahan Alam	35	27
3.	Suplemen Kesehatan	10	10

T a b e l	4.	Obat Kuasi	3	3
	5.	Kosmetik	71	63
	Jumlah Keseluruhan		176	152

3.3 Realisasi Kinerja IKU 1 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75	81,34	100,73	Sangat Baik 

Tabel 3.3 Capaian Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III tahun 2025

Capaian Persentase sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III tahun 2025 adalah 100,73% bila dibandingkan dengan target TW III sebesar 80,75% dan mendapatkan kategori sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat perubahan arah kebijakan BPOM seiring dengan adanya perubahan RENSTRA 2025-2029. Realisasi pada triwulan III menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
1.	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,34	85,93	(4,59)

Tabel 3.4 Capaian Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dibanding dengan Triwulan II Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase Sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 100,73%. Capaian pada TW III kategori tercapai/melampaui.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75	81,34	100,73	Tercapai / Melampaui 

Tabel 3.5 Capaian Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dibanding dengan target tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab penurunan capaian indikator masih akan tercapai sampai dengan triwulan III dapat dilihat berdasarkan rincian data di atas, dimana dari

sampel yang telah disampling dan diuji pada tahun 2025 mengalami perubahan dari komponen penilainnya yang meliputi dari awal tahap perencanaan, pelaksanaan, pengujian hingga tindaklanjutnya termasuk adanya kenaikan target IKU tahun 2025 menjadi 80,75%. Pada triwulan III tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan pada tahap pelaksanaan sampling dengan pedoman terbaru namun cukup berubah pada tahap kesesuaian dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian jadwal kemampuan uji laboratorium akibat adanya relaksasi dari efesiensi anggaran.

Langkah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan dan mempertahankan capaian Realisasi pada IKU yaitu pelaksanaan sampling obat sesuai dengan pedoman sampling obat dan secara tepat waktu sesuai dengan regionalisasi laboratorium serta menyusun perencanaan terbaru.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk persentase obat yang memenuhi syarat telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Adapun analisis kegiatan upaya yang dapat menunjang keberhasilan seperti : peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling, penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pengelolaan obat, Pengawasan penandaan produk sediaan farmasi yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana pelayanan farmasi dan distribusi sediaan farmasi agar melakukan monitoring produk *recall* agar senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut yang hasil pengujian yang dilakukan oleh UPT dilakukan secara rutin oleh Pusat untuk produk-produk yang TMS berupa surat penghentian sementara kegiatan atau penarikan produk di sarana distribusi agar produk tersebut tidak lagi beredar di masyarakat. Serta Melakukan evaluasi penandaan untuk produk yang akan disampling secara *on site* yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman sampling untuk sampel (jumlah minimal dan pengacakan sampel) untuk dapat meminimalisir sampel yang TMK penandaan.

IKU 2. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

- A. Kesesuaian Target Sampel**
- B. Kesesuaian Parameter Uji**
- C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan**
- D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel**
- E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian**
- F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya**

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Strategis :

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 - 1. kesesuaian target sampel UPT;
 - 2. kesesuaian parameter uji;
 - 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 - 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 - 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Pada Tahun 2025 jumlah target sampel pangan olahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling adalah 90 sampel. Sampel pangan olahan yang disampling sampai triwulan II tahun 2025 sebanyak 80 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Komoditi	Target Sampel Tahun 2025	Jumlah Sampel yang di Sampling TW III
1.	Pangan Olahan	90	80

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja IKU 2 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,92	116,38	Tidak Dapat Disimpulkan 

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III tahun 2025

Realisasi sampel pangan olahan yang disampling pada TW III tahun 2025 adalah 98,92%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 85,00% maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 116,38 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat perubahan arah kebijakan BPOM seiring dengan adanya perubahan RENSTRA 2025-2029. Penilaian atas realisasi capaian pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil peningkatan dibandingkan dengan pengukuran capaian pada Triwulan II.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III	REALISASI TW II	GAP
1.	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,92	95,08	3,84

Tabel 3.8 Capaian Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025 dibanding dengan Triwulan II

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhadap target tahun 2025 untuk indikator yaitu 116,37%. Capaian pada TW III kategori tidak dapat disimpulkan dimana perhitungan melampaui 110%.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	95,08	116,38	Tercapai/ Melampaui 

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dibanding dengan Target tahun 2025

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori sangat baik, yaitu mencapai 116,37%. Analisis

penyebab keberhasilan capaian indikator ini sampai dengan triwulan III dapat dilihat berdasarkan rincian data di atas, dimana dari sampel yang telah disampling sampai dengan triwulan III sebanyak 80 sampel. Pada triwulan III terjadi penyesuaian target tahunan yang meningkat menjadi 85% serta perhitungan terhadap pengukuran indikator khususnya terkait pengujian. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan pada tahap pelaksanaan sampling dengan pedoman terbaru namun cukup berubah pada tahap kesesuaian dengan perencanaan dikarenakan adanya jadwal kemampuan uji regionalisasi laboratorium akibat relaksasi dari efisiensi anggaran.

Adapun langkah-langkah upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja, yaitu : Melakukan sampling sesuai dengan kaidah dan pedoman sampling; Melakukan koordinasi dengan evaluator pusat ketika ada keraguan dalam penentuan evaluasi penandaan produk saat sampling; Melakukan pengecekan produk pada aplikasi untuk melihat penandaan produk makanan yang dilakukan sampling. Terhadap sampel yang TMS tersebut, balai penguji akan mengirimkan tindak lanjut hasil pengujian tersebut ke Pusat agar dapat ditindaklanjuti ke Produsen untuk melakukan perbaikan sehingga ke depannya produk yang beredar sesuai dengan persyaratan serta memonitoring hasil pelaksanaan sampling dari pusat.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk pangan olahan telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Adapun upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan capaian kinerja yaitu Pengawasan penandaan produk makanan yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi agar melakukan perbaikan untuk penandaan/ label produk agar senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut hasil pengujian yang dilakukan oleh UPT dilakukan secara rutin oleh Pusat untuk produk-produk makanan dengan hasil TMS berupa surat penghentian sementara kegiatan atau penarikan produk di sarana distribusi agar produk tersebut tidak lagi beredar di masyarakat dan

melakukan evaluasi penandaan untuk produk yang akan disampling secara *on site* yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman sampling untuk sampel (jumlah minimal dan pengacakan sampel) untuk dapat meminimalisir sampel yang TMK penandaan.

IKU 3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT

Definisi :

a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Adapun perhitungan persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah =

$$\frac{(30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

Keterangan :

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Penilain terhadap IKU dihitung terhadap jumlah sampel KLP KP yang ditindaklanjuti oleh UPT. Pada TW III terdapat kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di wilayah pengawasan UPT serta telah ditindaklanjuti terkait sampel makanan dugaan keracunan makanan tersebut sehingga capaian dapat terukur dengan rincian realisasi sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Baik 

Tabel 3.10 Capaian kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT TW III tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2025

Pada Triwulan sebelumnya tidak terdapat penilaian kinerja terhadap capaian Sampel KLB KP sehingga tidak terdapat data yang relevan untuk dilakukan perbandingan dengan realisasi pada Triwulan III.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
3.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	100

Tabel 3.11 Capaian kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT TW III Tahun 2025 dibanding dengan Triwulan sebelumnya

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target capaian kinerja pada tahun 2025 terkait IKU sampel KLB yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW III maka dapat dikategorikan tercapai 100%.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Tercapai 

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III dibanding dengan Target tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian indikator kinerja pada triwulan III telah dilakukan pembaharuan terkait pengukurannya. Penilaian pada hanya dapat dilakukan jika terdapat sampel KLB yang ditindaklanjuti oleh UPT. Pada Triwulan III terdapat kasus

dugaan keracunan pangan di wilayah kerja UPT dimana terdapat total 8 sampel pangan yang dilakukan sampling dan diuji ke BBPOM Palembang.

Adapun langkah-langkah upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam mempertahankan peningkatan capaian kinerja, yaitu: Tetap melakukan sampling sesuai dengan kaidah dan pedoman sampling; Melakukan koordinasi dengan evaluator pusat masing-masing komoditi dalam hal ketika ada keraguan dalam penentuan evaluasi pengujian produk saat sampling; dan Terhadap sampel yang TMS.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam mencapai capaian kinerja yaitu dengan tetap memonitoring kejadian KLB KP yang mungkin dapat terjadi pada Triwulan selanjutnya dengan berkoordinasi dengan kedinasan setempat.

IKU 4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A= Kesesuaian target sampel PIRT

B = Kesesuaian Parameter Uji

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

E = Ketepatan waktu pelaporan

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Keterangan:

1. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

3. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
4. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
5. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dan Target TW II tahun 2025

Pada Tahun 2025 jumlah target sampel PIRT Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling adalah 7 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Komoditi	Target Sampel Tahun 2025	Jumlah Sampel Yang di Uji
1.	Pangan IRT	7	7

Tabel 3.13 Realisasi Fisik Kinerja IKU Pangan IRTP Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,57	104,20	Sangat Baik 

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III tahun 2025 adalah 88,57%. Sedangkan target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 85 maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 104,20% dengan kategori Sangat Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat perubahan arah kebijakan BPOM seiring dengan adanya perubahan RENSTRA 2025-2029. Penilaian atas realisasi capaian pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Triwulan II dengan hasil dengan pengukuran capaian sebagai berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
4.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57	94,29	(5,72)

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025 dibanding dengan Triwulan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan target tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yaitu 104,20% dengan kategori tercapai/melampaui.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88,57	104,20	Tercapai / Melampaui 

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dibanding dengan Target Tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis Penyebab Penurunan capaian indikator ini sampai dengan triwulan III dapat dilihat berdasarkan rincian data diatas, dimana dari sampel PIRT yang telah disampling dan diuji sampai dengan triwulan III hasilnya memenuhi Syarat (MS) namun terdapat jenis pangan yang disampling tidak sesuai dengan kategori pangannya sehingga parameter uji tidak lengkap. Langkah upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Realisasi sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai memonitoring evaluasi yang akan diberikan oleh pusat terkait pelaksanaan sampling.

Target awal sampel PIRT sebanyak 7 sampel PIRT dan sampai dengan triwulan III sudah seluruhnya tersampling serta sudah semua sampel selesai dilakukan uji.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang Aman dan Bermutu telah dilakukan

sesuai dengan pedoman sampling. Adapun analisis kegiatan upaya yang dapat menunjang keberhasilan seperti: peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling, penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan, Pengawasan penandaan produk makanan yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi agar melakukan perbaikan untuk penandaan/ label produk agar senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut yang hasil pengujian yang dilakukan oleh UPT dilakukan secara rutin oleh Pusat untuk produk-produk yang TMS berupa surat penghentian sementara kegiatan atau penarikan produk di sarana distribusi agar produk tersebut tidak lagi beredar di masyarakat. Serta Melakukan evaluasi penandaan untuk produk yang akan disampling secara *on site* yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman sampling untuk sampel (jumlah minimal dan pengacakan sampel) untuk dapat meminimalisir sampel yang TMK penandaan.

IKU 5. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator ini mengukur tingkatan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
2. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Jumlah keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti sampai dengan triwulan III dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025 yaitu :

Bulan	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Januari	0	100
Februari	80	100
Maret	40	100
April	50	100
Mei	20.83	97.87
Juni	39.29	96.67
Juli	47,50	94,94
Agustus	59,18	96,55
September	60,32	96.77

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,00	77,87	85,57	Cukup 

Tabel 3.17 Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti Stakeholder sampai dengan triwulan III Loka POM diKota Lubuklinggau

Pada Triwulan III Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder terdapat penyesuaian capaian target indikator bulanan. Pada TW III dilakukan penyesuaian yaitu penetapan target capaian dengan nilai yang sama setiap bulannya yaitu 91,00

Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW III sebesar 85.57% dengan kategori cukup. Capaian indikator diperoleh dari Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT maupun yang ditindaklanjuti oleh UPT. Capaian masuk dalam kategori cukup dikarenakan beberapa pelaku usaha dan lintas sektor belum menindaklanjuti hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
5.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77,87	67.98	9,89

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder TW III Tahun 2025 dibanding dengan Triwulan II

Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan indikator baru tahun 2025 yang tidak terdapat pada indikator IKU tahun 2024.

Terdapat GAP dari perbandingan realisasi TW II dan TW III, yaitu sebanyak 9,89, hal ini disebabkan pelaku sebagian besar telah menindaklanjuti hasil tindak lanjut temuan petugas Loka POM di Kota Lubuk Linggau. Kenaikan realisasi juga dipengaruhi karena telah dilakukan bimbingan teknis tentang penyusunan *corrective action and preventif action* atau tindakan perbaikan dan pencegahan kepada pelaku usaha fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan pada bulan september 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu

85,57% dengan kategori akan tercapai. Realisasi Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didapatkan dari jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan (Pelaku Usaha dan Lintas Sektor)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.00	77,87	85,57	Akan Tercapai 

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penilaian Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder ditentukan dari jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan (Pelaku Usaha dan Lintas Sektor)

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan,

peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Jumlah Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat diwujudkan dengan adanya koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha yang dijalankan dengan baik sehingga rencana pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan sesuai dengan pedoman.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dapat menunjang pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan koordinasi yang baik antara UPT dan Pelaku Usaha/ Lintas Sektor serta peningkatan kompetensi petugas untuk dapat meningkatkan kemampuan terkait penilaian keputusan/rekomendasi terhadap sarana yang sesuai dengan pedoman.

IKU 6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara perhitungan :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa

x 100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

- a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
- b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
- d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas

sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Jumlah sarana produksi yang diperiksa samlai dengan triwulan III dari bulan Januari sampai dengan September 2025 yaitu :

Bulan	Kab/Kota	Sarana Produksi	
		MD	PIRT
Januari	Lubuk Linggau	1	0
Februari	-	0	0
Maret	Lubuk Linggau	1	0
April	-	0	0
Mei	Pagar Alam	1	1
Juni	Musi Rawas Utara	0	2
Juli	Empat Lawang	0	3
Agustus	Lahat	0	2
September	-	0	0
Jumlah		3	8

Target	15
--------	----

Tabel 3.18 Realisasi sarana produksi triwulan III Loka POM di Kota Lubuk Linggau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
6.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Sangat Baik 

Tabel 3.19 Capaian Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025

Capaian indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 109.89 % dengan kategori Sangat Baik. Capaian indikator diperoleh dari Jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dilaporkan ke pusat melalui SIPT, Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai pedoman yang dihitung dari rata-rata aspek ketepatan waktu, kesesuaian tindak lanjut dan kesesuaian grading.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
6.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	0

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dan TW sebelumnya

Pada TW III Tahun 2025 realisasi kinerja untuk indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 100% dan untuk realisasi TW II Tahun 2025 yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat GAP antara realisasi TW II dan TW III tahun 2025. Realisasi ini didapatkan dari perbandingan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah sarana yang diperiksa dimana pada TW II dan TW III tahun 2025 seluruh sarana yang diperiksa telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 109.89. Realisasi Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 3 sarana produksi MD dengan hasil pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan dalam penerapan CPPOB dan 8 sarana produksi PIRT dengan hasil pemeriksaan 6 sarana memenuhi ketentuan dalam penerapan CPPB-IRT dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dalam penerapan CPPB-IRT.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
6.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109,89	Tercapai/Melampaui 

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dibanding dengan target 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penilaian Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditentukan dari Jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan sarana produksi yang dilaporkan ke pusat melalui SIPT, Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai pedoman yang dihitung dari rata-rata aspek ketepatan waktu, kesesuaian tindak lanjut dan kesesuaian grading.

Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dimana sarana yang diperiksa dipilih dengan beberapa parameter diantaranya kebaruan sarana, tingkat resiko sarana dan riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya. Sarana MD yang diperiksa sebagian besar sudah menerima pembinaan dan juga sudah pernah mengikuti bimtek CPPOB sebelumnya, sehingga sudah mengetahui mengenai penerapan CPPOB. Pada TW III rencana pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target perencanaan setelah relaksasi anggaran.

Langkah upaya untuk melakukan penyempurnaan kinerja terhadap sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melakukan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dapat menunjang pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan update peningkatan kompetensi petugas untuk menunjang pengawasan sarana produksi sehingga Penilaian Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat sesuai dengan pedoman.

IKU 7. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Cara perhitungan : Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

- A. **Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan** = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa selama triwulan III dari bulan Januari sampai dengan September 2025 yaitu :

Bulan	Kab/Kota	Sarana Distribusi		
		OBAT	OBA,SK	KOS
sampai September	Lubuklinggau Empat Lawang	54	40	22
Jumlah		54	40	22
Target		146		

Tabel 3.22 Realisasi sarana distribusi Triwulan III Loka POM di Kota Lubuklinggau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
7.	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	97.42	107.35	Sangat Baik 

Tabel 3.23 Capaian Indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025

Capaian indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 107.35 % dengan kategori sangat baik. Capaian indikator diperoleh dari Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi, distribusi Obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, dengan parameter penilaian kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu

dari pelaksanaan inspeksi, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi, dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
7.	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.42	97.73	0.31

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dan TW sebelumnya

Indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru tahun 2025 yang tidak terdapat pada indikator IKU tahun 2024

Terdapat GAP dari perbandingan realisasi TW III dan TW II, yaitu sebanyak 0.31 hal ini disebabkan karena adanya perubahan target indikator kinerja presentase faslitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dari TW III (90.75) dan TW II (91.75), sehingga realisasi perbandingan relalisasi kinerja TW II tahun 2025 dengan reliasasi TW III tahun 2025.

3. Perbandingan Realiasasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 107.35% dengan kategori tercapai. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi, Obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik sebanyak 116 sarana.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
7.	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	97.42	107.35	Tercapai/Melampaui 

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dibanding dengan target 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penilaian Indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti ditentukan dari Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi, distribusi Obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, dengan parameter penilaian kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi, dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan pembobotan hasil pemeriksaan sebelumnya dengan hasil pemeriksaan penghentian sementara kegiatan, peringatan keras atau sarana baru. Pada triwulan III pelaksanaan kegiatan telah dilakukan menyesuaikan target relaksasi anggaran dan telah sesuai dengan target dari unit pengampu BPOM pusat masing-masing kedeputan. Langkah upaya untuk melakukan penyempurnaan kinerja terhadap Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu

pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan pedoman.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dapat menunjang pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan update peningkatan kompetensi petugas untuk menunjang pengawasan sarana distribusi sehingga Penilaian Indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilakukan sesuai dengan pedoman.

IKU 8. Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- . Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - 2. Ketepatan waktu pelaporan
 - 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

B : Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times ((\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

C : Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

C : Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa selama triwulan III dari bulan Januari sampai dengan September 2025 yaitu :

Bulan	Kab/Kota	Sarana Distribusi Pangan
Januari sd september	Lubuklinggau Musi Rawas Musi Rawas Utara Empat Lawang Lahat Pagar Alam	13
Target		21

Tabel 3.26 Realisasi sarana distribusi Triwulan III Loka POM di Kota Lubuklinggau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
8.	Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Sangat Baik 

Tabel 3.27 Capaian Indikator Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025

Capaian indikator Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 109.89 % dengan kategori Sangat Baik. Capaian indikator diperoleh dari pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu pelaporan, dan kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
8.	Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	-

Tabel 3.28 Realisasi Indikator Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dan TW sebelumnya

Indikator Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru tahun 2025 yang tidak terdapat pada indikator IKU tahun 2024.

Realisasi sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III yaitu 100% dan untuk realisasi TW II Tahun 2025 yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat GAP antara realisasi TW II dan TW III tahun 2025. Realisasi ini didapatkan dari perbandingan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah sarana yang diperiksa dimana pada TW II dan TW III tahun 2025 seluruh sarana yang diperiksa telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 109.89% dengan kategori tercapai. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 31 sarana.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
7.	Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Tercapai/ Melampaui 

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III dibanding dengan target 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penilaian Indikator Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti ditentukan dari pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu pelaporan, dan kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan pembobotan hasil pemeriksaan sebelumnya dengan hasil pemeriksaan penghentian sementara kegiatan, peringatan keras atau sarana baru. Pada triwulan III rencana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan target dari unit pengampu BPOM pusat masing-masing kedeputian setelah adanya relaksasi anggaran. Langkah upaya untuk melakukan penyempurnaan kinerja terhadap Persentase fasilitas distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan pedoman.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dapat menunjang pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan update peningkatan kompetensi petugas untuk menunjang pengawasan sarana distribusi sehingga Penilaian Indikator Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilakukan sesuai dengan pedoman.

IKU 9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan

Pangan Olahan. Penilaian terhadap capaian iklan yang diawasi adalah mulai dari pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$A = (a+b)/2$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$B = \text{rata-rata } (a+b+c)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

$$C = \text{rata-rata } (a+b+c)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

- c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

$$\frac{a + b}{2}$$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$a = \frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (sebanyak 4)}} \times 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\% \text{ Capaian Pengawasan Iklan} = \frac{\text{capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \times 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$b = \frac{b1 + b2}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT (b1)

$$b1 = \frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat (b2)

$$b2 = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 40\%$$

- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$b = \frac{(\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{Jumlah iklan yang diawasi})}{\text{Proporsi target media}} \times 20\%$$

- c. Ketepatan waktu pelaporan

$$c = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 40\%$$

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Berikut adalah tabel kertas kerja untuk indikator kinerja persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan yang telah dilakukan selama triwulan III tahun 2025

Nama Indikator	Bulan	Target Iklan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Juli	30	100,00	100,00	100,00	100,00	98,24	99,65
	Agustus	30	100,00	100,00	100,00	100,00	95,70	99,14

Diawasi Sesuai Ketentuan	September	30	100,00	100,00	100,00	100,00	96,27	99,25
--------------------------	-----------	----	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Tabel 3.30 Monitoring kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan TW III

Pada triwulan III tahun 2025, semua iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi, dan kosmetik dilakukan pengawasan sesuai dengan kategori iklan dan dilaporkan tepat waktu, sedangkan untuk iklan pangan dikarenakan surat edaran baru diterima UPT di akhir Februari 2025, sehingga pengawasan iklan pangan di Februari dan Maret tidak sesuai kategori iklan yang ditetapkan, yang mengakibatkan capaian iklan pangan sebesar 96,27% di akhir triwulan III, dan didapatkan realisasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada triwulan III sebesar 99.25%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
9.	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90,40	99.25	109,79	Sangat Baik 

Tabel 3.31 Capaian Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan TW III Tahun 2025

Capaian indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan sebesar 109,79 % dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target TW III tahun 2025 sebesar 90,40% capaian yang didapat sebesar 109,79% dengan kategori Sangat Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
9.	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	99.25	99.58	(-0,33)

Tabel 3.32 Realisasi Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan TW III dan TW sebelumnya

Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan untuk realisasi pada TW II lebih besar dibandingkan dengan realisasi TW III, dikarenakan pada TW III tepatnya di bulan Agustus dilakukan penyesuaian target yang semula 89,2% menjadi 90,4% sehingga terjadi penurunan capaian realisasi TW III dengan GAP (-0,33)

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW II tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase sarana distribusi sediaan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 111,64% dengan kategori tercapai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
9.	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90,4	99.25	109,79	Tercapai/Melampaui 

Tabel 3.33 Capaian Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 99.25% dengan capaian sebesar 109,79 % dan mendapat kategori Tercapai. Loka POM di Kota Lubuklinggau akan tetap melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat mempertahankan pencapaian target di triwulan selanjutnya

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Tercapainya target indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dikendalikan melalui sosialisasi indikator kinerja termasuk perhitungan target dan capaian kepada seluruh personil yang bertanggung jawab terhadap pengawasan iklan, penetapan target iklan sesuai surat edaran yang telah ditetapkan oleh unit pengampu, dan penetapan timeline pelaporan iklan pada aplikasi SIPT kepada setiap tim yang akan melakukan pengawasan iklan.
- 2) Membuat evaluasi hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III Tahun 2025, sehingga kesalahan pengawasan iklan tidak terulang di tahun 2025.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

- 1) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, yang merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko terhadap potensi risiko tidak tercapainya indikator kinerja

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatkan peran aktif petugas untuk mengambil iklan sediaan farmasi dan makanan saat sedang melakukan kegiatan pemeriksaan lainnya, sehingga bisa dijadikan bahan sebagai hasil pengawasan iklan di bulan tersebut

IKU 10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Definisi :

- a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan

daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan dan Formula:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar:

$$Persentase = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan Jumlah Target Pengawasan Label

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Label

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

1. Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
2. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
3. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

4. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Target produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi labelnya oleh Loka POM di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 yaitu sebanyak 84 produk. Adapun realisasi kinerja terkait Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
10.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	84.13	105.16	Sangat Baik 

Tabel 3.34 Perbandingan Capaian indikator kinerja IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III dibanding dengan Target TW III Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III tahun 2025 mencapai 84.13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah melampaui target pada TW III tahun 2025 sebesar 80.00% dengan nilai capaian menyentuh angka 105.16%. Mengacu pada nilai capaian tersebut, pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dapat dikategorikan Sangat Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar TW III tahun 2025 dengan TW II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
10.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84.13	-	-

Tabel 3.35 Perbandingan Capaian indikator kinerja IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III dibanding dengan TW II

Perbandingan realisasi kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar TW III tahun 2025 dengan realisasi kinerja TW II tahun 2025 tidak dapat ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh manual IKU terkait Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diterbitkan pada periode TW III tahun 2025 sehingga data yang dapat dihitung dimulai dari pengawasan yang dilakukan pada TW III tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar TW III tahun 2025 terhadap target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
10.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	84.13	105.16	Tercapai/Melampaui 

Tabel 3.36 Perbandingan Capaian indikator kinerja IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III dibanding dengan Target Tahun 2025

Mengacu pada tabel di atas, realisasi kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III tahun 2025 sebesar 84.13%. Dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III tahun 2025 telah mencapai nilai 105.16% dan dapat dikategorikan sebagai Tercapai/Melampaui. Untuk itu, Loka POM di Kota Lubuk Linggau akan terus melakukan perbaikan kinerja terkait persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar agar tetap mempertahankan nilai capaian kinerja pada TW masih dalam kategori Tercapai/Melampaui.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Tercapainya target indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III tahun 2025 karena jumlah target tahunan yang telah ditentukan sebelumnya bahkan sebelum dikeluarkan manual IKU. Oleh karena itu, pembagian jumlah target yang akan diawasi dapat ditentukan setiap bulannya sampai dengan akhir tahun sehingga capaian kinerja pada TW III tahun 2025 dapat dikategorikan Tercapai/Melampaui. Adapun angka persentase capaian kinerja yang tinggi diakibatkan oleh beberapa penyesuaian jumlah target yang diawasi setiap bulanya pada TW sebelum dikeluarkan manual IKU

pada periode TW III tahun 2025.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Memaksimalkan pembagian target pengawasan setiap bulan dalam setahun sesuai dengan target tahunan serta meningkatkan peran aktif petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

IKU 11. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 = $(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

Keterangan :

1. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
2. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
3. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Definisi :

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
 - **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:**
Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
 - SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Pada Tahun 2025 Nilai SKL untuk UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 11. Nilai tersebut berdasarkan tingkat laboratorium pada Level 1

sesuai dengan status UPT yang masih Loka. Adapun rincian realisasi sebagai berikut :

No	Komponen SKL	% Pemenuhan	% Bobot	Capaian
1.	Persentase Pemenuhan SRL	6,69	75	5,02
2.	Persentase Pemenuhan Peralatan	12,5	15	1,87
3.	Persentase Pemenuhan Kompetensi Penguji	40	10	4
Jumlah				10,89

Tabel 3.37 Realisasi Kinerja IKU Nilai SKL Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
10.	Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	10,89	10,89	100	Sangat Baik 

Tabel 3.38 Capaian indikator kinerja Persentase Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada TW III tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat perubahan arah kebijakan BPOM seiring dengan adanya perubahan RENSTRA 2025-2029. Penilaian atas realisasi capaian pada Triwulan III menunjukkan kenaikan hasil dibandingkan Triwulan II Tahun 2025 hasil dengan pengukuran sebagai berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW II 2025	REALISASI TW III 2025	GAP
10.	Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	10,89	10,78	0,11

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada Triwulan sebelumnya

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada tahun 2025 diharapkan Nilai Pemenuhan SKL pada Indikator Kinerja akan mencapai nilai 11, jika dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2025 untuk indikator ini yaitu 99% dengan kategori akan tercapai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
10.	Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	11	10,89	99	Akan Tercapai 

Tabel 3.40 Capaian indikator kinerja IKU Nilai SKL pada TW III dibanding dengan Target Tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan capaian realisasi terhadap target triwulan III yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau disebabkan karena sebagian komponen penilaian SKL sudah terpenuhi pada tahun sebelumnya sehingga pelaksanaan kinerja masih dapat dioptimalkan melalui ketersediaan sarana, peralatan dan reagen yang masih tersedia. Selain itu sudah terdapat peningkatan dikarenakan adanya 1 metoda analisa yang telah berhasil diverifikasi. Namun jika dibandingkan dengan target Tahun 2025 capaian masih belum berhasil dan dikategorikan akan tercapai dikarenakan masih terdapat standar ruang lingkup pengujian untuk laboratorium level 1 yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan penyusunan perencanaan dan strategi dalam memenuhi sasaran khususnya dengan kemungkinan adanya relaksasi anggaran pada triwulan selanjutnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan capaian kinerja diantaranya :

1. Melakukan perencanaan terhadap pemenuhan Nilai SKL termasuk dalam penyediaan reagen dan peralatan untuk memenuhi Standar Ruang Lingkup pengujian Kimia
2. Mengoptimalkan ketersediaan reagen dan peralatan yang telah diadakan pada tahun sebelumnya untuk dimanfaatkan dalam memenuhi standar laboratorium level 1 pada tahun 2025 berupa penambahan ruang lingkup pengujian melalui verifikasi metoda analisa.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komponen penilaian pada Indikator ini dinilai berdasarkan ketersediaan peralatan, personil dan kemampuan uji yang dapat dipenuhi oleh UPT. Keberhasilan dalam Pengadaan peralatan dan reagensia laboratorium kimia yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya menjadi nilai tambah dalam baseline penilaian Tahun 2025. Selain itu UPT secara rutin setiap tahunnya melakukan pengembangan kompetensi petugas pengujian sehingga

kebutuhan tim penguji yang memiliki kompetensi dapat terpenuhi. Terdapat pendampingan dari Tim PPPOMN pada triwulan sebelumnya terkait pengembangan laboratorium sehingga dapat memberikan masukan terhadap tercapainya IKU.

IKU 12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu: $\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$ Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT. 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula: Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D AMR di wilayah UPT

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Realisasi pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Rencana Aksi Pengendalian AMR	Pelaksanaan kegiatan				Total
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penggunaan Tools Pengawasan AMR	-	-	12.5%	12.5%	25%
Pelaksanaan Bimtek	-	-	25%	-	25%
Pelaksanaan Advokasi	-	-	25%	-	25%
Publikasi	-	-	12.5%	12.5%	25%

Tabel 3.41 Realisasi pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” merupakan IKU yang baru diterapkan di Loka Lubuk Linggau pada TW III, realisasi kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target. Kegiatan yang dilaksanakan dalam indikator ini terdiri dari 4 kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan Penggunaan Tools Pengawasan AMR telah digunakan oleh petugas Loka POM Lubuk Linggau saat pemeriksaan rutin ke sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek, selama TW III penggunaan tools AMR sebanyak 11 apotek, yang telah lebih dari target pelaksanaan yaitu 10 apotek.
2. Kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis telah dilaksanakan pada tanggal 22

September 2025, kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan dalam rangka pengenalan resistensi antimikroba, bahaya resistensi antimikroba, pencegahan resistensi antimikroba, program pengendalian resistensi antimikroba, peranan pelaku usaha/organisasi kesehatan dalam pengendalian resistensi antimikroba serta memaparkan hasil pengawasan Badan POM mengenai resistensi antimikroba di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan Bimbingan Teknis telah dilaksanakan pada TW III dengan mengundang 37 peserta baik dari Penanggung Jawab Sarana Apotek, Organisasi Profesi dan Dinas terkait, pada kegiatan juga dilaksanakan penandatanganan komitmen pengendalian resistensi antimikroba

3. Pelaksanaan Advokasi dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba ini adalah bentuk upaya menjalin kerjasama/kolaborasi dengan *stakeholder* pemerintah daerah dalam mengendalikan resistensi antimikroba, tujuan pelaksanaan advokasi ini adalah penyampaian informasi hasil pengawasan apotek dalam menyerahkan antibiotik dan penggalangan komitmen keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengendalian resistensi antimikroba selain itu pelaksanaan advokasi ini adalah membangun dialog dan kolaborasi antara Badan POM dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penyampaian informasi hasil pengawasan terhadap praktik penyerahan antibiotik di apotek, serta menggalang komitmen bersama dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba. Output dari pelaksanaan advokasi ini adalah menggalang komitmen pemerintah daerah dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba. Kegiatan advokasi pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada TW III bersama Pemerintah Kota Lubuk Linggau, hasil advokasi berupa Surat Edaran yang diterbitkan oleh Walikota Kota Lubuk Linggau dengan nomor 440/925/DINKES.02/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Penggunaan Antibiotik dengan Bijak untuk Pencegahan Resistensi Antibiotik
4. Kegiatan publikasi berupa penyampaian evaluasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dengan menampilkan persentase jumlah apotek yang masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau, dokumen kegiatan publikasi pada TW III Loka POM di Kota Lubuk Linggau dipublikasikan melalui media sosial (*official account*) dengan tujuan agar dapat diakses oleh

masyarakat dan organisasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran penggunaan antibiotik dengan bijak serta pemerintah di wilayah kerja untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-

Tabel 3.42 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator persentase pemenuhan pengendalian AMR TW III tidak terdapat target dan realisasi, sehingga perhitungan akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan realisasi Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW III 2025	Realisasi TW II 2025	GAP
12.	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-

Tabel 3.43 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR TW III dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR pada TW III dan TW II tahun 2025 tidak terdapat target sehingga perhitungan realisasi akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Persentase capaian Indikator pemenuhan target pengendalian AMR pada TW III sebesar 75%, diperoleh dari penggunaan tools pengawasan AMR TW III dan masih terdapat pelaporan pada TW IV, pelaksanaan bimtek 25%, pelaksanaan advokasi 25% serta publikasi TW III (masih terdapat publikasi pada TW IV)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12.	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	75.00	75.00	Akan tercapa 

Tabel 3.44 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR TW III dibanding dengan target 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Indikator pemenuhan pengendalian AMR terdapat pada TW IV yang merupakan target tahunan sehingga belum bisa dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan. dan kegiatan masih proses berjalan, namun unit kerja telah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya guna mempertahankan/perbaikan dan kemajuan kinerja kedepan mencapai target pengendalian AMR yang sesuai dengan pedoman antara lain

- Penggunaan tools pengawasan antibiotik secara tepat dan lengkap menggunakan sistem pelaporan terintegrasi
- Optimalisasi koordinasi bersama lintas sektor terkait dan organisasi profesi dalam upaya pengendalian AMR
- Pelaksanaan publikasi hasil pengawasan dengan melakukan monitoring hasil pengawasan secara berkala

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dapat menunjang pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan update peningkatan kompetensi petugas untuk menunjang pengawasan sarana distribusi dalam upaya pengendalian AMR sehingga Penilaian Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR dapat dilakukan sesuai dengan pedoman

IKU 13. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator kinerja unit yang dilakukan penilaian capaian pada TW IV. Tahapan kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota pangan aman yaitu :

1. Advokasi Lintas Sektor
2. Pemilihan Kab/Kota pendampingan pengisian tools
3. Pendampingan pengisian tools penilaian mandiri oleh Kab/Kota
4. Pelaporan pendampingan pengisian tools penilaian mandiri oleh Kab/Kota

Kegiatan pada indikator persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman yaitu telah dilaksanakan seluruh rangkaian kegiatan meliputi

1. Advokasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 di Kantor Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau Bp. H. Ir. Trisko Defriyansa, M.Si. Sekretaris Daerah kota Lubuk Linggau mendukung penuh adanya kegiatan kota pangan aman dengan menunjuk bagian ekonomi setda sebagai PIC, beliau juga mengharapkan Kota Lubuk Linggau dapat melengkapi data dukung serta dapat masuk pada nominasi Kota Pangan Aman Tahun 2025. Pemerintah Kota Lubuklinggau akan menjadwalkan untuk pertemuan dengan OPD dengan PIC bidang Ekonomi Pemkot Lubuklinggau. PIC akan mempelajari terkait tools penilaian kota pangan aman dan akan mengadakan pertemuan dengan OPD terkait untuk membahas dan memverifikasi data dukung. Selanjutnya dilaksanakan advokasi juga secara daring untuk Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat

Lawang, Kab. Lahat dan Kota Pagar Alam secara daring pada tanggal 28 Juli 2025. Pada kegiatan advokasi hampir seluruh kab/kota belum menerima surat kawat dari kemendagri untuk pengisian tools secara mandiri kab/kota pangan aman. Setelah advokasi dilaksanakan maka Loka POM di Kota Lubuk Linggau memilih Kota Lubuk Linggau sebagai target untuk dilakukan pendampingan dikarenakan Kota Lubuk Linggau mendukung secara penuh kegiatan KKPA.

2. Telah dilaksanakan pendampingan secara langsung pada tanggal 17 Juli 2025 oleh Loka POM di Kota Lubuk Linggau kepada Kabid bidang ekonomi setda Lubuk Linggau dengan menjelaskan terkait tools KKPA, siapa saja OPD yang terlibat dalam tools dan data dukung apa saja yang harus dikumpulkan oleh OPD terkait.
3. Tanggal 28 Juli 2025 dilaksanakan advokasi lintas sektor untuk Kota Lubuk Linggau beserta OPD terkait, Kab. Musi Rawas beserta OPD terkait, Kab. Musi Rawas Utara beserta OPD terkait, Kab. Empat Lawang beserta OPD terkait, Kab. Lahat beserta OPD terkait dan Kota Pagar Alam beserta OPD terkait, tentang Kab/Kota Pangan Aman oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau.
4. Tanggal 7 Agustus 2025 dilakukan pendampingan pengisian tools KKPA kepada OPD Kota Lubuk Linggau di Ruang Rapat Sekretaris Daerah namun belum seluruh OPD mempunyai data dukung yang dapat diupload.
5. Tanggal 29 Agustus 2025 dilakukan pendampingan pengisian tools KKPA tahap 2 untuk OPD Kota Lubuk Linggau, namun masih mendapatkan nilai 56 dan masih banyak data dukung yang belum lengkap
6. Tanggal 26 September 2025 dilakukan pendampingan pengisian tools KKPA tahap 3 untuk OPD Kota Lubuk Linggau,
7. Sampai dengan tanggal 26 september 2025 dari beberapa OPD di Kota Lubuk Linggau yaitu dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, dinas perikanan, bapedda, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah menyampaikan data dukung namun belum lengkap dan belum seluruh dinas memiliki dokumentasi yang diminta pada data dukung. Nilai yang didapatkan oleh Kota Lubuk Linggau yaitu 69,10

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-

Tabel 3.46 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman baru dilakukan penilaian pada TW IV, sehingga perhitungan akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025

6. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan realisasi Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW III 2025	Realisasi TW II 2025	GAP
12.	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-

Tabel 3.47 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman TW III dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada TW III dan TW II tahun 2025 tidak terdapat target. realisasi target beserta penilaian dilakukan pada TW IV

7. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Persentase capaian Indikator pemenuhan target Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sampai dengan TW III yaitu telah dilaksanakan pendampingan pengisian tools oleh Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan hasil self assesment yaitu 69,10. dimana target dari indikator ini yaitu kab/kota yang didampingi mendapatkan minimal nilai 60.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12.	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100.00	100,00	100,00	Tercapai 

Tabel 3.48 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman TW III dibanding dengan target 2025

8. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab keberhasilan indikator yaitu adanya dukungan dari pemerintah kota yang dilakukan pendampingan untuk memenuhi pengisian data dukung pada tools yang telah ditentukan. Langkah-langkah atau upaya-upaya guna mempertahankan/perbaikan dan kemajuan kinerja kedepan mencapai target pendampingan kab/kota pangan aman yaitu pendekatan persuasif kepada pemerintah daerah beserta lintas sektor terkait untuk melakukan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga pada pengisian tools lebih mudah untuk memenuhi data dukungnya.

9. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dapat menunjang pencapaian kinerja yaitu dengan melakukan advokasi lintas sektor kepada pemerintah daerah untuk dukungan dalam melaksanakan kab/kota pangan aman di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

3.1.2. Capaian Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100,93% dengan kategori sangat baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
11.	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,59	89.82	103,73	Sangat Baik 
12.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50,00	50,00	100,00	Baik 
13.	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	100,00	Baik 
14.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00	Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN KEGIATAN (Σ NSS)				100,93	Sangat Baik 

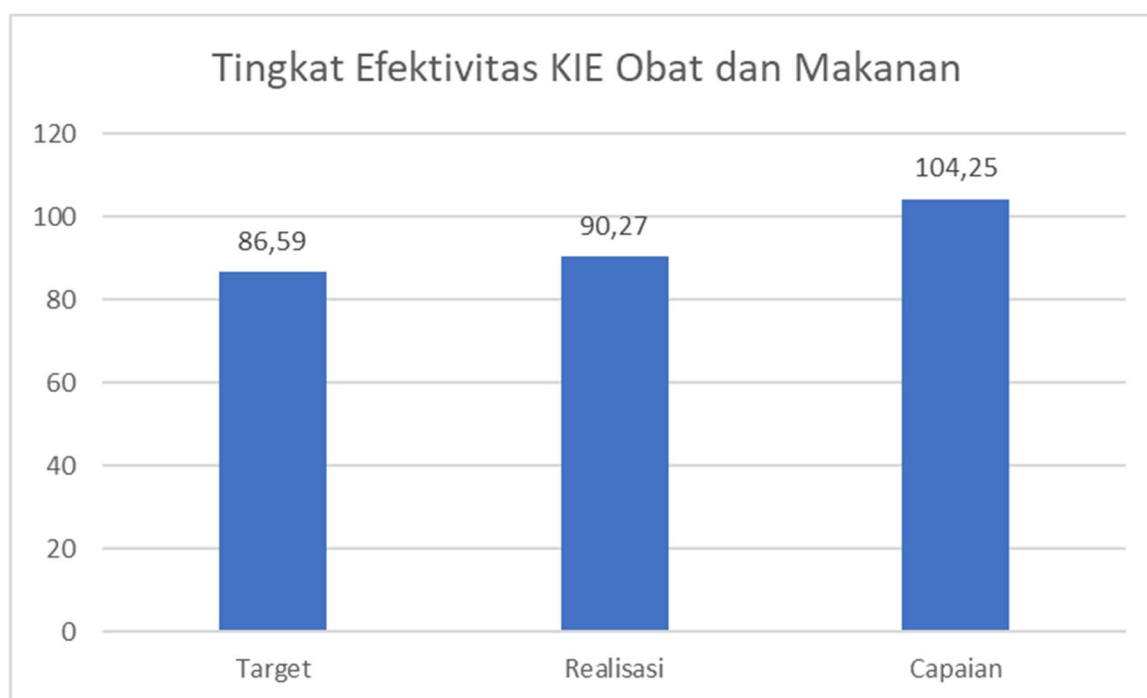
Tabel 3.49 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

IKU 11. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,59	89,82	103,73	Sangat Baik

Tabel 3.50 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW III Tahun 2025



3.51 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau TW III Tahun 2025 dari 99 koresponden sebesar 89.82% sehingga persentase capaian TW III tahun 2025 untuk tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 103,73% dengan kategori pencapaian sasaran Sangat Baik. Pada tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau

memiliki ragam jenis program KIE yang meliputi KIE secara langsung, KIE media sosial, media cetak dan media luar ruang.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW II	REALISASI TW III	GAP
1.	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	90.27	89.82	0.45

Tabel 3.52 Realisasi kinerja TW III dibandingkan dengan realisasi TW II

Pada TW III tahun 2025 realisasi kinerja sebesar 89.82. Realisasi TW II tahun 2025 untuk indikator Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan 90.27. Realisasi kinerja yang diperoleh mengalami penurunan dari TW II tahun 2025 ke TW III tahun 2025 hal ini bisa terjadi dikarenakan perbedaan jenis media yang digunakan dalam kegiatan penyebaran informasi. Jenis media penyebaran informais yang digunakan pada TW ini yaitu leaflet dimana jangkauan terbatas hanya menjangkau kelompok tertentu saja dan adanya resiko masyarakat yang menerima leaaflet tidak membaca secara menyeluruh sehingga pesan KIE tidak tersampaikan secara efektif.

3. Perbandingan Realiasasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86.59	89.82	103,73	Tercapai 

Tabel 3.53 Capaian Persentase Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan realisasi TW III dibandingkan dengan target 2025

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan sasaran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 86,59%. Persentase realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan III tahun 2025 adalah 89,82%. Dengan demikian persentase pencapaian tingkat efektivitas KIE adalah sebesar 103,73% dan mendapatkan kriteria Tercapai.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada triwulan III tahun 2025, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,73 %, Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 disebabkan antara lain oleh:

1. KIE dilaksanakan secara tatap muka (luring) dalam bentuk Darling (*Drive Thru* Edukasi Keliling) dengan tema stunting ke Posyandu Marga Mulya Pada tanggal 17 Juli 2025
2. KIE dilaksanakan secara tatap muka (luring) dalam bentuk Darling (*Drive Thru* Edukasi Keliling) dengan tema Waspada Bahan Berbahaya ke SLB Negeri Musi Rawas Pada tanggal 21 Agustus 2025
3. KIE memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube Hasil penilaian efektifitas KIE pada kegiatan di atas sebagai berikut:
 - Sumber Informasi (89.103)
 - Konten/Informasi (88.141)
 - Pemahaman Audiens (93,109)
 - Manfaat (85.89)
4. KIE melalui media cetak dalam acara KIE AMR pada tanggal 22 september 2025
5. Peningkatan kualitas materi dan desain media KIE agar lebih menarik, mudah dipahami, serta sesuai dengan karakteristik sasaran
6. Pendampingan kepada audiens dalam pelaksanaan survey

Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KIE pada Triwulan III tahun 2025 efektif dan berdampak positif, baik dalam hal penyebaran informasi maupun peningkatan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, Loka POM di Kota Lubuklinggau akan terus melakukan inovasi metode KIE yang lebih interaktif, menarik, dan partisipatif agar efektivitas kegiatan dapat semakin ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat..

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada triwulan III tahun 2025, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,73 %, program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan Darling dengan tema ‘stunting’ pada tanggal 17 Juli 2025 di Posyandu Marga Mulya Kota Lubuklinggau
2. Pelaksanaan Darling dengan tema ‘Waspada Bahan Berbahaya’ pada tanggal 21 Agustus 2025 di SLB Negeri Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas
3. KIE melalui media sosial dengan tema konten sesuai arahan pusat.
4. KIE melalui media cetak yaitu leaflet

Dalam upaya mencapai indikator kinerja efektivitas KIE Obat dan Makanan, masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan KIE, yaitu perubahan perilaku masyarakat terhadap obat dan makanan aman memerlukan proses yang tidak instan. KIE yang bersifat satu kali kegiatan belum cukup untuk membentuk kesadaran yang mendalam. Oleh karena itu, perlu penguatan strategi komunikasi yang lebih kreatif dan adaptif, seperti pemanfaatan media digital, pendekatan komunitas, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan.

IKU 12. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)

Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari - Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Pada Tahun 2025 target jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 2 sekolah dengan 12 sekolah perluasan dengan beberapa tahapan proses sesuai dengan petunjuk teknis dari unit pengampu.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50,00	50,00	100,00	Baik 

Tabel 3.54 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan TW III tahun 2025

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan TW III tahun 2025 adalah 50,00 dibandingkan dengan target 50,00 maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 100,00 % dengan kategori Baik. Realisasi dengan capaian Baik dikarenakan target IKU pada sekolah telah dilakukan perubahan sesuai dengan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu 1 sekolah intervensi dengan capaian 50,00%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II tahun 2025 dengan Realisasi TW I tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW II	REALISASI TW III	GAP
12.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	37,50	50,00	12,50

Tabel 3.55 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan TW III dibanding dengan TW II

Terdapat kenaikan realisasi kinerja karena terdapat proses tahapan yang telah dilakukan yaitu pada TW III kegiatan pada sapa sekolah telah selesai dilaksanakan sampai pada sertifikasi sekolah sehingga mendapatkan realisasi kegiatan sebesar 50,00 sedangkan pada TW II, untuk kegiatan sapa sekolah dilaksanakan sesuai dengan juknis unit pengampu yaitu advokasi, sosialisasi dan monitoring kader sekolah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET tahun 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	50,00	50,00	Perlu Upaya Keras 

Tabel 3.56 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan TW III dibanding dengan Target tahun 2025

Realisasi kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan dibandingkan target tahun 2025 memperoleh capaian 50,00 dengan kategori perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 target jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 2 sekolah. Sedangkan saat ini pelaksanaannya hanya 1 sekolah. Hal ini di karenakan adanya efisiensi anggaran berupa pemblokiran anggaran sesuai inpress 1 tahun 2025. Sehingga untuk realisasi 50,00% tersebut hanya untuk pelaksanaan 1 sekolah. Pada TW III telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring untuk 1 sekolah intervensi dan 6 sekolah perluasan bets 2.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis kegagalan pada IKU ini adalah adanya pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi anggaran sesuai inpres 1 tahun 2025. Pemblokiran anggaran ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan untuk IKU ini hanya 1 sekolah dari target yang diberikan adalah 2 sekolah. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sekolah bets 2 secara daring namun kurang efektif karena tidak seluruh undangan hadir pada kegiatan sosialisasi serta peserta

tidak selalu mengikuti kegiatan sampai akhir acara. Analisis penyebab keberhasilan sapa sekolah yaitu dengan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan KAK dari unit pengampu, serta memilih sekolah yang memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan beberapa tahapan kegiatan pada sapa sekolah, memberikan materi-materi semenarik mungkin sehingga mampu diikuti dan diterapkan oleh peserta sampai akhir kegiatan. Adapun langkah-langkah upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja yaitu berkoordinasi dengan unit pengampu terkait pelaksanaan program SAPA Sekolah dan mengajukan surat perubahan target sekolah menjadi 1 sekolah intervensi dan 6 sekolah perluasan.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja yaitu karena Sekolah yang diintervensi merupakan sekolah yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan sapa sekolah dengan adanya penandatanganan komitmen bersama untuk mensukseskan sapa sekolah. Kader sapa sekolah yang terbentuk juga telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Loka POM Lubuklinggau sesuai dengan juknis. Koordinasi dengan stakeholder dan unit pengampu terkait timeline dan juknis yang dilaksanakan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan sapa sekolah untuk menciptakan kantin sekolah yang aman dan sehat.

IKU 13. Jumlah Desa Pangan Aman

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan: advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian. Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan pada TW III yaitu Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan kegiatan Advokasi bersama lintas sektor. Advokasi yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara lintas sektor dan Loka POM di Kota Lubuklinggau terkait kegiatan Program Prioritas Nasional di Kota Lubuklinggau sehingga kegiatan yang berjalan di tahun 2025 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Kelurahan Marga Mulya merupakan kegiatan pemberian materi kepada Kader kelurahan marga mulya terkait materi keamanan pangan, adapun jumlah kader yang mengikuti pelatihan sebanyak 5 orang dengan narasumber Loka POM di Kota Lubuklinggau. dan Bimbingan Teknis Komunitas Kelurahan Marga Mulya, kegiatan ini merupakan sosialisasi kepada komunitas yang berada di kelurahan marga mulya seperti komunitas ibu rumah tangga, komunitas sekolah, komunitas pangan olahan, komunitas pangan siap saji, komunitas remaja, dan komunitas ritel dengan narasumber Kader Kelurahan Marga Mulya yang telah diberi pengetahuan terkait keamanan pangan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau Setelah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Desa, kemudian kader diminta untuk membuat *Plan Of Action* yang disetujui oleh pejabat setempat sebagai bentuk dukungan replikasi kegiatan yang akan dilakukan oleh kelurahan pada tahun berikutnya. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam periode Juli - September 2025.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
13.	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	100,00	Baik 

Tabel 3.16 Capaian kinerja Jumlah desa pangan aman TW III tahun 2025

Realisasi jumlah desa pangan aman pada TW III tahun 2025 adalah 100,00 bila dibandingkan dengan target 100,00, maka capaian yang diperoleh adalah 100,00 dan mendapatkan Kategori “Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III	REALISASI TW II	GAP
13.	Jumlah desa pangan aman	100,00	75,00	25,00

Tabel 3.57 Capaian kinerja jumlah desa pangan aman TW III tahun 2025 dibanding dengan realisasi TW II tahun 2025

Indikator kinerja jumlah desa pangan aman merupakan indikator yang pelaksanaan kegiatan mengikuti timeline dari unit pengampu pusat dalam hal ini PMPU Pangan Olahan BPOM RI. Adapun Timeline kegiatan Desa Pangan Aman sebagai berikut :

No	Tahapan Kegiatan	Timeline Kegiatan
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	Februari - April 2025
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	Maret - April atau Juli- Agustus 2025
3.	Bimtek Komunitas Desa	Mei - Juni atau September - Oktober 2025
4.	Monitoring dan Evaluasi	Juli atau November

Dari timeline diatas kegiatan Desa Pangan Aman dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau di TW III periode Juli - September 2025 dari mulai kegiatan advokasi kelembagaan desa, pelatihan kader keamanan pangan desa (KKPD) Bimtek Komunitas Desa dan Monitoring Evaluasi mengikuti timeline yang disediakan oleh unit pengampu PMPU Pangan Olahan Badan POM RI.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Desa Pangan Aman dilaksanakan pada bulan Agustus 2025

tidak mengikuti timeline yang disediakan oleh unit pengampu, adapun justifikasi kegiatan tidak sesuai timeline unit pengampu sebagai berikut :

- Belum adanya kesiapan dari Desa dalam hal perencanaan rencana aksi kelurahan di tahun 2026
- Kepastian pelantikan dari pejabat daerah yang diintervensi dalam hal pengesahan rencana aksi kelurahan

Namun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai dengan timeline unit pengampu ini tidak mempengaruhi realisasi kegiatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
13.	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	100,00	Tercapai 

Tabel 3.58 Capaian kinerja jumlah desa pangan aman TW III dibanding dengan target tahun 2025

Presentase capaian indikator kinerja jumlah desa pangan aman sebesar 100,00% dengan kategori tercapai. Adapun kegiatan desa pangan aman telah selesai dilaksanakan dengan akhir kegiatan di monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau pada bulan Agustus 2025. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akhir dari pelaksana kegiatan desa pangan aman di Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan harapan kegiatan desa pangan aman dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Kota Lubuklinggau di tahun berikutnya dengan gambaran kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang tertuang dalam plan of action Kader Kelurahan yang telah disahkan oleh Lurah setempat sebagai bentuk bukti dukungan pemerintah kota lubuklinggau dalam menjalankan kegiatan desa pangan aman di Kota Lubuklinggau.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

- a. Kegiatan Desa Pangan Aman telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau dibuktikan dengan tanda tangan komitmen bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk pelaksanaan Program Prioritas Nasional tahun 2025 di Kota Lubuklinggau.
- b. Kegiatan Desa Pangan Aman telah dilaksanakan dari tahapan advokasi kelembagaan desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa dilaksanakan sesuai timeline yang telah ditentukan dan berjalan sesuai timeline.
- c. Telah terbentuk Kader Keamanan Pangan Kelurahan Marga Mulya yang berjumlah 5 orang kader terdiri dari Kader Keluarga, Kader Sekolah dan Kader Ritel.
- d. Telah terbitnya *Plan Of Action* kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2026 oleh Kader Kelurahan Marga Mulya dan telah disahkan oleh Lurah Marga Mulya sebagai bentuk dukungan untuk mereplikasi kegiatan Desa Pangan Aman secara mandiri pada tahun 2026 di Kota Lubuklinggau.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja yaitu karena pada TW III Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menyelesaikan seluruh tahapan program desa pangan aman di kelurahan marga mulya kota lubuklinggau. Dengan telah diterbitkannya *plan of action* replikasi kegiatan desa pangan aman tahun 2026 oleh kader kelurahan merupakan bukti kesiapan dan dukungan dari kelurahan untuk terus menerapkan keamanan di Kelurahan Marga Mulya Kota Lubuklinggau.

IKU 14. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Definisi Operasional

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda

dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, money pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Cara Perhitungan: -

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
14.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik 

Dihitung dari jumlah pasar yang:

Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Target tahapan pada triwulan III untuk program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebesar 100% untuk kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar. Sehingga total realisasi triwulan III adalah sebesar 100% dengan capaian 100% terhadap target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III	REALISASI TW II	GAP
14.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	75,00	25,00

Pada TW III tahun 2025 realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100%. realisasi TW II yaitu 75% sehingga adanya kenaikan capaian kinerja TW III terhadap realisasi TW II tahun 2025 untuk indikator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Adanya kenaikan realisasi pada TW III dikarenakan pada TW III tahapan pasar pangan aman

berbasis komunitas sudah melakukan keseluruhan tahapan selanjutnya yaitu Monitoring evaluasi kegiatan pasar.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu yaitu 100% dengan kategori tercapai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
14.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	tercapai 

Tabel 3.59 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III dibanding dengan target tahun 2025

Pada triwulan III telah dilakukan monitoring evaluasi pada kegiatan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan bobot 100% termasuk kategori **Tercapai** untuk 1 pasar. Perhitungan realisasi berdasarkan pembobotan dan bersifat kumulatif sehingga diperlukan strategi dan komitmen untuk mencapai target akhir tahun.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab Keberhasilan program dilakukan dengan membuat perencanaan jadwal pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memenuhi tahapan pada juknis BPOM salah satunya karena:

- **Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal** yang telah ditetapkan oleh Badan POM, sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target.
- **Koordinasi lintas sektor yang efektif**, baik dengan pemerintah daerah,

lembaga pendidikan, maupun pengelola pasar yang menjadi sasaran intervensi, sehingga kegiatan memperoleh dukungan penuh di tingkat lapangan.

- **Ketersediaan materi dan media edukasi yang memadai**, serta peningkatan kapasitas kader pasar dalam menyampaikan pesan KIE secara komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada triwulan III sesuai dengan juknis Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang dijadwalkan pada Maret-Agustus 2025 sesuai KAK program PPABK setelah pemotongan (efisiensi anggaran). Kegiatan advokasi merupakan kegiatan 3 program prioritas nasional yang dilaksanakan bersamaan untuk efisiensi waktu dan anggaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja program ini didukung oleh beberapa faktor penting, antara lain:

1. koordinasi awal antara Loka POM dan pemerintah daerah, sehingga tahapan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan efektif dan sesuai sasaran.
2. Dukungan aktif dari komunitas dan pengelola pasar, yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan penerapan keamanan pangan di lokasi intervensi.
3. Pemanfaatan pendekatan partisipatif dan edukatif, melalui kegiatan KIE dan advokasi langsung kepada pelaku usaha, pengelola pasar, serta masyarakat sekitar, yang meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap penerapan pasar pangan aman.

Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas kader dan pengelola pasar agar dapat menjaga keberlanjutan hasil intervensi.

3.1.3. Capaian Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kinerja utama, dari hasil capaian indikator pada TW III sebesar 111.76 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan . Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,00	95,00	111,76	Tidak Dapat Disimpulkan 
RATA – RATA NILAI SASARAN KEGIATAN (Σ NSK)				111,76	Tidak Dapat Disimpulkan 

Tabel 3.60 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

IKU 15. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara

- pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Pada Tahun 2025 jumlah target progress pada IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 100%, sampai dengan TW III 2025 progress pendampingan UMK pangan olahan yang telah dilakukan yaitu 95% dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Komoditi	Kegiatan	Bobot Progres	Proses Sampai TW III
1.	Pangan	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	5%
		Penetapan UMK pangan olahan target	10%	10%
		Bimtek CPPOB	30%	30%
		Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	50%	50%
		- Gap assessment implementasi CPPOB	15%	15%
		- Pendampingan penyusunan dokumen	15%	15%

	- Coaching esertifikasi/ akun	15%	15%
	- Terbit IP CPPOB	5%	5%
	Monev dan Pelaporan	5%	0%
Rata-rata			60%

Tabel 3.61 Realisasi Kinerja IKU 5 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
15.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,00	95,00	111,76	Tidak Dapat Disimpulkan 

Tabel 3.62 Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TW III tahun 2025

Dalam mencapai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan dimana masing-masing tahapan memiliki nilai persentase yang nantinya akan diakumulasikan menjadi target akhir. Adapun tahapan pelaksanaan pendampingan yang dimaksud yaitu :

1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (5%);

2. Penetapan UMK pangan olahan target (10%);
3. Bimbingan Teknis CPPOB (30%);
4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB (50%);
5. Pelaporan dan Monitoring Pasca Pendampingan (5%).

Perhitungan tahapan pendampingan untuk realisasi bulan Januari-Juli 2025 masih mengikuti perhitungan sebelumnya dimana pada tahapan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB belum dijabarkan bobot setiap tahapan di dalamnya. Pada bulan Agustus-September 2025 dilakukan penjabaran pada bobot tahapan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pendampingan dan juga pembobotan progress yang dimaksud:

1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (Januari - Maret) : Bobot 5%
2. Seleksi dan Penetapan UMK Pangan Olahan target pendampingan (Maret) : Bobot 10%
3. Bimtek CPPOB (Maret - April) : Bobot 30%
4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB : Total Bobot 50%
 - Gap assesment implementasi CPPOB (April - Oktober) : Bobot 15%
 - Pendampingan penyusunan dokumen (April - Oktober) : Bobot 15%
 - Coaching esertifikasi/akun (Juni - November) : Bobot 15%
 - Terbit IP CPPOB (Juni - November) : Bobot 5%
5. Monev dan Pelaporan (November-Desember) : Bobot 5%

Sampai dengan TW III 2025 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian 95% diantaranya yang telah dilaksanakan di TW I 2025 yaitu KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (Bobot 5%) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26-27 Februari 2025 yang dilaksanakan dalam bentuk kuliah whatsapp yang diikuti oleh 22 pelaku usaha UMK pangan olahan. Selain itu sudah dilakukan Penetapan UMK pangan olahan target (Bobot 10%) dengan Surat Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Lubuklinggau Nomor. HK.02.02.7C.03.25.17 Tahun 2025 tentang Pendampingan UMK Oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dalam Rangka Pendaftaran Pangan Olahan yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2025. Pada TW II kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan pelaksanaan Bimtek Penerapan CPPOB untuk UMK Pangan Olahan

(Bobot 30%) yang dilaksanakan secara hybrid yaitu pelaksanaan melalui zoom pada tanggal 28 dan 29 April 2025 dan secara langsung pada tanggal 30 April 2025, kegiatan bimtek diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta yang merupakan UMK Pangan Olahan di Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya pada TW II dan III telah dilaksanakan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB (Bobot 50%) yaitu kegiatan *gap assessment* implementasi CPPOB yang dilaksanakan di bulan April (Bobot 15%), pendampingan penyusunan dokumen yang dilaksanakan pada bulan Mei- Juli (Bobot 15%), coaching esertifikasi/ akun yang dilaksanakan pada bulan Juni-Juli (Bobot 15%) dan penerbitan IP CPPOB yang dilaksanakan pada bulan Juli (Bobot 5%).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II tahun 2025 dengan Realisasi TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
15.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	95.00	60.00	35.00

Pada TW III Tahun 2025 realisasi kinerja untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 95% dan untuk realisasi TW II Tahun 2025 yaitu 60%. Berdasarkan hal ini maka di dapatkan gap sebesar 35% yaitu adanya penambahan realisasi pada TW III sebesar 35% menjadi 95%.

Realisasi dihitung berdasarkan progress pendampingan yang dilakukan kepada UMK Pangan Olahan. Progress pendampingan ini dilakukan penjadwalan dimana setiap tahapan telah ditentukan rentang waktu

pelaksanaanya. Untuk target TW I tahun 2025 pada indikator ini adalah 15% yaitu dengan target pendampingan yang dilakukan yaitu KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan dengan bobot 5% dan Penetapan UMK pangan olahan target dengan bobot 10%. Pada TW II pelaksanaan pendampingan dilakukan terhadap 2 tahapan lanjutan yaitu Bimbingan Teknis CPPOB dengan bobot 30% dan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB yang pada TW II dilakukan dengan bobot 15% sehingga total bobot di TW II sebesar 45%. Pada TW III dilakukan pelaksanaan pendampingan pada tahapan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB dengan total bobot di TW III sebesar 35%. Berdasarkan hal tersebut maka realisasai progress pendampingan UMK yaitu sebesar 95%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Pada TW II tahun 2025 capaian kinerja terhadap target tahun 2025 untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu 65,22%. Capaian pada TW II kategori masih akan tercapai dikarenakan masih terdapat tahapan pendampingan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PROGRES 2025	REALISASI PROGRES TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
15.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00	95,00	95,00	Akan Tercapai 

Tabel 3.63 Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TW III tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dihitung berdasarkan jumlah IP CPPOB yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah sarana UMK pangan olahan yang dilakukan pendampingan. Selain itu capaian juga dihitung berdasarkan progress tahapan pendampingan yang diterima oleh sarana UMK pangan olahan.

Analisis penyebab capaian indikator tidak dapat disimpulkan yaitu adanya penambahan pembobotan untuk tahapan yang ada pada tahap ke 4 yaitu Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB. Selain itu sarana yang dilakukan pendampingan merupakan sarana yang sudah dilakukan pendampingan di tahun lalu namun masih terkendala terkait pengelompokan pada kategori pangannya. Pada tahun 2025 pangan olahan yang diproduksi dapat masuk pada kategori pangan 04.2.2.8 Sayur (Termasuk Jamur, Akar dan Umbi, Polong-polongan, dan Aloe Vera), dan Rumput Laut yang Dimasak pada jenis pangan olahan sayur sebagai dendeng sayur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Perubahan Kategori Pangan dan Perubahan Bahan Baku yang Berasal dari Tanaman atau Hewan. Sehingga proses pengajuan IP CPPOB dan pendaftaran produk dapat dilakukan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Di awal tahun 2025 terdapat pemblokiran dalam rangka efisiensi anggaran sesuai inpress 1 tahun 2025 sehingga beberapa tahapan pendampingan dilakukan penyesuaian yaitu dengan pelaksanaan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan secara hybrid (2 hari secara daring dan 1 hari secara luring) dan untuk target kegiatan pendampingan umkm di dalam kota menggunakan mobil operasional kantor dan bersamaan dengan pelaksanaan pendampingan secara daring dengan menggunakan WhatsApp.

Langkah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

olahan yaitu dengan melakukan perencanaan pelaksanaan pendampingan UMK pangan olahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada pedoman dan perhitungan capaian kinerja berdasarkan Manual IKU yang baru.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada TW III terdapat kegiatan yang menunjang pencapaian target pada kegiatan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB adanya layanan online yang digunakan sebagai alternatif pendampingan selain dari pendampingan yang dilakukan secara langsung ke sarana dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp selain itu pemanfaatan subsite sebagai media pengumpulan informasi seputar pendaftaran produk pangan di Badan POM yang dapat lebih mudah di akses pada satu tempat. Selain itu juga dilakukan pemanfaatan program desk mandiri untuk unit pelaksana teknis (UPT) BPOM dengan metode konsultasi, sehingga proses pendaftaran produk dapat lebih cepat.

3.1.4. Capaian Sasaran Kegiatan IV**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT**

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)$.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$

Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	50	55	110	Sangat Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN KEGIATAN (Σ NSK)				110	Sangat Baik 

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4

IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Target TW III tahun 2025 fungsi Penindakan pada IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 50%, sedangkan untuk realisasi TW III sebesar 55%, maka berdasarkan hal tersebut capaiannya sebesar 110% dengan kategori “Sangat Baik”.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Pada tahun 2025 untuk target perkara Loka POM di Kota Lubuklinggau berjumlah 1 (satu) perkara. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara setelah dilakukan operasi penindakan.

Terhadap perkara *carryover* tahun 2021 sebanyak 1 (satu) perkara telah dilakukan gelar khusus pada tanggal 6 Agustus 2025 di Polres Lubuk Linggau yang dihadiri oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuk Linggau, PPNS BBPOM Palembang serta Korwas PPNS Polres Lubuk Linggau, dimana hasil gelar tersebut yaitu dalam proses penetapan DPO, dengan berdasarkan surat Loka POM di Kota Lubuk Linggau Nomor : R-PD.03.03.7C.08.25.392 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Permohonan Bantuan Diterbitkan DPO

(Daftar Pencarian Orang), sehingga berdasarkan manual IKU terbaru Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT, untuk perkara *carryover* tahun 2021 sudah dikecualikan atau sudah tidak lagi dihitung menjadi capaian perkara di TW III tahun 2025.

Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025 Loka POM di Kota Lubuk Linggau telah melakukan operasi penindakan di Kab. Empat Lawang dengan komoditi Obat Bahan Alam.

Adapun rincian realisasi sampai dengan Triwulan III sebagai berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
SPDP	0	0	0,00	15%	15%
Tahap I	1	0	0,00	40%	55%
P21	0	0	0,00	30%	0
Tahap II	0	0	0,00	15%	0
Realisasi sampai dengan TW I	0	0	0	0	0
Realisasi Carry Over	0	0	0	0	0

Tabel 3.65 Realisasi Kinerja IKU 19 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	50	55	110	Sangat Baik 

Tabel 3.66 Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT TW III tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2025

Pada TW III tahun 2025 proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara sudah berada di tahap 1 (penyerahan berkas perkara) kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga realisasi kinerja sebesar 55%,

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
19.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	55%	0%	55%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Realisasi kinerja TW III tahun 2025 yaitu sebesar 55% sedangkan untuk target kinerja terhadap tahun 2025 sebesar 95%. Capaian kinerja TW III terhadap Target Tahun 2025 masih dalam kategori “Perlu Upaya Keras”.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	95%	55%	57,89%	Perlu Upaya Keras 

Tabel 3.67 Capaian Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dibanding dengan target tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab peningkatan kinerja pada IKU Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT yaitu :

- Telah dilakukannya operasi penindakan dan penyidikan pada tanggal 12 Agustus 2025 dimana pada di TW III tahun 2025 proses sudah berjalan pada Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sehingga nilai kinerja pada TW III tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan TW II tahun 2025;
- Telah dilakukannya gelar khusus perkara *carryover* tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 di Polres Lubuk Linggau yang dihadiri oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuk Linggau, PPNS BBPOM Palembang serta Korwas PPNS Polres Lubuk Linggau, dimana hasil gelar tersebut yaitu dalam proses penetapan DPO, dengan berdasarkan surat Loka POM di Kota Lubuk Linggau Nomor : R-PD.03.03.7C.08.25.392 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Permohonan Bantuan Diterbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang), sehingga berdasarkan manual IKU terbaru Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT, untuk perkara *carryover* tahun 2021 sudah dikecualikan atau sudah tidak lagi dihitung menjadi capaian perkara di TW III tahun 2025;
- Adanya koordinasi yang baik dengan para *Criminal Justice System* (CJS) di Wilayah Hukum Loka POM di Kota Lubuk Linggau khususnya CJS Kab. Empat Lawang.

Langkah upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan yang dilakukan yaitu :

- Perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kekuatan sarana dan prasarana serta Sumber daya manusia yang dimiliki;
- Koordinasi yang baik dengan para *Criminal Justice System* (CJS) di Wilayah Hukum Loka POM di Kota Lubuklinggau khususnya dengan Kejaksaan Negeri Empat Lawang.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- Melakukan percepatan terhadap penyelesaian berkas perkara *Carry Over* tahun 2021 berupa dilaksanakan gelar khusus membahas penyelesaian perkara tersebut;
- Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.
- Melakukan percepatan terhadap penyelesaian berkas perkara tahun 2025 dimana dalam hal ini masih dalam proses Tahap I.

3.1.5. Capaian Sasaran Kegiatan V

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- 1) Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

$$\frac{\text{Jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disusun}}$$

- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

$$\frac{\text{Nilai Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan}}{\text{Nilai Maksimal Penilaian Analisis}}$$

- c. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Cegah Tangkal yang Telah ditindaklanjuti UPT}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Cegah Tangkal yang disampaikan ke UPT}}$$

Keterangan:

- a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu

dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

- b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
20.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	100	Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN KEGIATAN (Σ NSS)				100	Baik 

Tabel 3.68 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Pada tahun 2025, target Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk indikator Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT yaitu 90% yang terbagi menjadi 2 yaitu

1. Analisis penelusuran siber dengan bobot 50%, berupa :
 - a. Hasil kegiatan patroli siber : realisasi pelaporan sebanyak 12 kali setahun (Laporan bulanan) dengan indikator ketepatan waktu

- b. Penjejukan digital (Profiling) : Realisasi pelaporan 12 kali setahun (Laporan Bulanan)
- 2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan bobot 50%, berupa :
 - a. 1 dokumen Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
 - b. 1 dokumen Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Jadi, untuk total target fisik untuk indikator Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar yaitu sebanyak 14 laporan/ dokumen.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

Pada tahun 2025, target Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk indikator Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT yaitu 90% yang terbagi menjadi 2 yaitu

- 1. Analisis penelusuran siber dengan bobot 50%, berupa :
 - a. Hasil kegiatan patroli siber : realisasi pelaporan sebanyak 12 kali setahun (Laporan bulanan) dengan indikator ketepatan waktu
 - b. Penjejukan digital : Realisasi pelaporan 12 kali setahun (Laporan Bulanan)
- 2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan bobot 50%, berupa :
 - a. 1 dokumen Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%), yang akan dilaksanakan di TW IV tahun 2025;
 - b. 1 dokumen Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%) yang akan dilaksanakan di TW IV tahun 2025.

Pada TW III 2025 target atas indikator tersebut diatas, berupa kegiatan Analisis penelusuran siber sebesar 50%, target tersebut telah diselesaikan dalam bentuk realisasi atas indikator tersebut sesuai yakni sebesar 50% Adapun rincian realisasi sampai dengan Triwulan III sebagai berikut :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	2025		Target %	Realisasi %	Nilai Realisasi
	Target TW III	Realisasi TW III			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber	9 Laporan	9 Laporan	50%	50%	50%
Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan	0	0	0%	0%	0%
Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT	0	0	0%	0%	0%
Realisasi sampai dengan TW III	9 Laporan	9 Laporan	50%	50%	50%

Tabel 3.69 Realisasi Kinerja IKU 20 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
20.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50%	50%	50%	Baik 

	diselesaikan sesuai standar				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Tabel 3.70 Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025 dengan TW II Tahun 2025

Terhadap Indikator Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT merupakan Indikator yang baru ada di tahun 2025, pada TW II 2025 realisasi sebesar 50% dan realisasi TW III sebesar 50%, progress realisasi tersebut sudah sesuai dengan perencanaan.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III	REALISASI TW II	GAP
20.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	0

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 90%, sedangkan realisasi di TW III tahun 2025 sebesar 50%, sehingga capaiannya yaitu 55,56% dengan kategori “Perlu Upaya Keras”.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
16.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UP	90%	50%	55,56 %	Perlu Upaya Keras 

Tabel 3.71 Capaian Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dibanding dengan Target Tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada tahun 2025, target Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk indikator Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT merupakan indikator baru yang ada didalam fungsi Penindakan khususnya di Loka POM di Kota Lubuklinggau, hal tersebut merupakan terobosan baru bagi fungsi di kedeputan IV yang pada waktu lampau kinerja Penindakan hanya dinalai dalam aspek Penegakan Hukum terbatas dalam berapa jumlah perkara yang naik didalam *Pro Justitia*, dalam indikator terbaru tersebut menumbukan sebuah harapan dan semangat baru untuk fungsi di Bidang penindakan, karena kinerja tidak hanya diukur hanya terbatas dalam dalam berapa jumlah perkara yang naik didalam Pro Justitia, namun juga dapat diukur dalam suatu bentuk kegiatan lain juga dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan berbentuk produk Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT. Indikator tersebut harus disikapi dengan suatu kegiatan yang komprehensif mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap indikator tersebut diatas sehingga target yang ditetapkan demikian dapat direalisasikan sempurna oleh fungsi Penindakan Loka POM di kota Lubuklinggau.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai dan merealisasikan target Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT harus dapat kolaborasi fungsi dengan Keseluruhan fungsi di Loka POM di kota Lubuklinggau dan stakeholder lain yang berkaitan dengan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau khususnya stakeholder yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada Penegakan Hukum. Bentuk Kolaborasi tersebut adalah

sebagai berikut :

- a) Pertukaran informasi kepada fungsi lain di Loka POM di Kota Lubuklinggau dan/ atau Stake holder lain terkait dengan dugaan tindak pidana obat dan makanan yang dapat menjadikan informasi deteksi dini
- b) Pemberian data-data hasil pemeriksaan, pengujian dan data hasil lain yang ada kaitanya dengan obat dan makanan yang dijadikan informasi dalam penyusunan analisis obat dan makanan.

3.1.6. Capaian Sasaran Kegiatan VI

Layanan Publik UPT yang Prima

Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kinerja utama, indikator ini tidak memiliki target di TW III. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks pelayanan publik UPT	-	-	-	-
RATA – RATA NILAI SASARAN KEGIATAN (Σ NSK)				-	-

Tabel 3.72 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

IKU 18. Indeks pelayanan publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik dihitung dengan rumus 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai dibagi sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks pelayanan publik UPT	-	-	-	-

Tabel 3.73 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks pelayanan publik UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau

Target IPP untuk Loka POM di Lubuklinggau tahun 2025 adalah 3,60 yang merupakan target maksimal untuk semua satker dan UPT Badan POM. Penilaian IPP dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM, dilaksanakan sekali dalam setahun, sehingga tidak ada capaian target per triwulan.

Indikator Indeks pelayanan publik UPT pada TW III tahun 2025 tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks pelayanan publik Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Realisasi TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW III 2025	Realisasi TW II 2025	GAP	KATEGORI
8.	Indeks pelayanan publik UPT	-	-	-	-

Tabel 3.74 Realisasi Indikator Kinerja Indeks pelayanan publik UPT TW III dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indeks pelayanan publik UPT baru dapat dilihat pada akhir TW IV setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM. Sehingga untuk perbandingan Indeks pelayanan publik UPT terhadap Triwulan sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Indeks pelayanan publik UPT pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks pelayanan publik UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks pelayanan publik UPT	3,60	-	-	-

Tabel 3.75 Capaian Indikator Kinerja Indeks pelayanan publik UPT TW III dibanding dengan tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV sehingga belum bisa dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan dan kegiatan masih proses berjalan. Namun pada TW III telah dilakukan upaya dalam melaksanakan pelayanan publik di Loka POM di Kota Lubuklinggau, seperti:

- Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menyediakan layanan kepada masyarakat baik itu layanan informasi berupa konsultasi dan pengaduan, layanan terkait sertifikasi dan layanan pengujian. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menerima layanan sebanyak 8 layanan terdiri dari layanan terkait sertifikasi yaitu 2 layanan, pengujian produk 3 layanan, info umum 2 layanan dan layanan pengaduan terkait penjualan obat 1 layanan. Dimana seluruh layanan pada TW III telah close 100 % dan telah selesai ditindaklanjuti 100%. Sampai dengan TW III Loka POM di Kota Lubuk Linggau telah menerima

11 layanan sertifikasi dan sudah menerbitkan 10 layanan sertifikasi dan 1 layanan yang saat ini sedang proses revisi data dukung permohonan. 10 layanan yang sudah diterbitkan yaitu 3 layanan Izin Penerapan CPPOB, 3 layanan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam sertifikasi CDOB, 3 layanan hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK dan 1 layanan Audit Surveilens SMKPO.

- Pada TW III Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan penilaian PEKPP yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI terkait pemenuhan sarana prasarana unit layanan pengaduan konsumen dan dokumen untuk keperluan layanan Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Loka POM di Kota Lubuklinggau telah memperoleh nilai PEKPP yang merupakan penilaian untuk IKU Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 4.43 dengan kategori Sangat Baik
- Penilaian IPP tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan nilai 4,43 kategori Sangat Baik meningkat dari penilaian IPP Tahun 2024 dengan nilai 3,73 kategori Sangat Baik.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV sehingga belum bisa dilakukan analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dimana kegiatan masih proses berjalan. Namun pada TW III telah dilakukan program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelayanan publik dengan tersedianya berbagai media yang konsumen dapat akses untuk mendapatkan pelayanan dari Loka POM di Kota Lubuklinggau. Selain itu, adanya program inovasi yang terus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti:

- DARLING (*Drive Thru* Edukasi Keliling) yaitu bentuk kegiatan KIE dengan menggunakan mobil laboratorium keliling kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman.
- POJOK (POjok INfo) yaitu bentuk kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dalam bentuk infografis di Media Sosial Loka POM di Kota Lubuklinggau.

3.1.7. Capaian Sasaran Kegiatan VII

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100% dengan kriteria “Baik”. Namun terdapat 3 indikator yang tidak memiliki target di TW III yaitu Nilai AKIP UPT dan Nilai Kinerja Anggaran, serta Indeks Manajemen resiko UPT. Untuk target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-
20.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM BPOM	-	-	-	-
21.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-
22.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	70	76,19	101,59	Sangat Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN KEGIATAN (Σ NSk)				101,59	Sangat Baik 

Tabel 3.76 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII

IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 3.77 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau

Indikator Nilai AKIP UPT pada TW III tahun 2025 tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan realisasi Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW III 2025	Realisasi TW II 2025	GAP
19.	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-

Tabel 3.78 Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT TW III dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Nilai AKIP baru dapat dilihat pada akhir TW IV setelah dilakukan penilaian oleh unit pemangku (APIP) Sehingga untuk perbandingan nilai AKIP terhadap Triwulan sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2025

Indikator Nilai AKIP UPT pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Nilai AKIP UPT BPOM	77,67	-	-	-

Tabel 3.79 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT TW III dibandingkan target 2025

3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV sehingga belum bisa dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan. dan kegiatan masih proses berjalan.

Meskipun penilaian dilakukan pada TW IV, unit kerja telah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya guna mempertahankan/perbaikan dan kemajuan kinerja kedepan mencapai nilai AKIP yang sesuai dengan pedoman dan targetnya

- Seperti Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu,
- Saling berkoordinasi dan komunikasi mencapai sasaran kinerja atas IKU Unit kerja serta target output unit kerja serta
- melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap capaian kinerja dan anggaran unit kerja
- Melakukan rapat monev kinerja dan anggaran setiap bulannya yang dipimpin oleh kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Adanya aplikasi simakin yang membantu dalam mencatat sasaran kinerja UPT yang diturunkan ke masing masing pegawai
- Adanya aplikasi monev online yang memudahkan satker untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Misalnya aplikasi simetris,, e-performance, dan aplikasi sakti.

IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain : 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Penyerapan anggaran 4. Data Kontrak 5. Penyelesaian Tagihan 6. Dispensasi Penyampaian SPM 7. Pengelolaan UP/TUP 8. Capaian Output:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
20.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 3.80 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV

tahun 2025. Namun untuk nilai IKPA Loka POM di kota Lubuklinggau sampai dengan bulan September 2025 adalah 100

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan realisasi kinerja Triwulan sebelumnya (Triwulan II tahun 2025)

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW III tahun 2025	REALISASI TW II tahun 2025	GAP
20.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0

Tabel 3.81 Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan realisasi triwulan sebelumnya

Pada tahun 2025 untuk NKA menggunakan indeks. Sehingga untuk perbandingan dengan triwulan sebelumnya tidak dapat dibandingkan. dan untuk penilaian NKA dilakukan pada akhir tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II dengan target tahun 2025

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
20.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-

Tabel 3.82 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM TW III dibandingkan target 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada triwulan III, untuk IKU ini belum bisa dilakukan analisi penyebab keberhasilan dan kegagalan atas kinerja pada IKU ini. Hal ini dikarenakan perhitungan capaian kinerja untuk IKU ini dilakukan pada TW IV. Namun terdapat upaya atau langkah-langkah dalam perbaikan dan mempertahankan kinerja kedepan pada IKU yaitu

- koordinasi dengan masing-masing pegawai yang bertanggung jawab atas dalam hal ketercapaian target output serta ketepatan dalam pelaksanaan rencana penarikan dana (RPD)
- Koordinasi dan evaluasi antar bidang dan tim keuangan serta PPK guna melakukan percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran dan kegiatan dengan melakukan revisi DIPA/POK
- Melakukan monitoring terhadap nilai IKPA pada aplikasi OMSPAN

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Aplikasi OMSPAN yang membantu dalam memonitoring nilai IKPA satker
- Aplikasi penilaian untuk EKA (Smart DJA) masih dalam proses penyempurnaan dan untuk nilai IKPA belum ada karena masih dalam perbaikan aplikasi pada SAKTI untuk indikator capaian output.
- Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti workshop/bimtek yang diselenggarakan internal BPM maupun eksternal BPOM

IKU 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
21.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 3.83 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Penilaian pada indeks manajemen resiko dilakukan pada akhir tahun yaitu pada triwulan IV tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
21.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Penilaian pada indeks manajemen resiko dilakukan pada akhir tahun yaitu pada triwulan IV tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW I tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2025.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
21.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,72	-	-	-

Tabel 3.85 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM TW III dibandingkan target 2025

6. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Meskipun IKU ini dilakukan penilaian di akhir tahun namun Loka POM di kota Lubuklinggau melakukan upaya dalam mengatasi kendala antara lain

1. Melakukan awarness terhadap seluruh pegawai pada organisasi terkait pentingnya manajemen risiko didalam organisasi
2. Melakukan Refreshment terkait manajemen risiko kepada sebagian/ dan atau seluruh pegawai di setiap semester
3. Monitoring dan evaluasi pencapaian manajemen risiko terhadap kertas kerja pada tahun n-1 sehingga menjadi perbaikan dan peningkatan manajemen risiko pada tahun ke n

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka pencapaian tingkat maturitas manajemen risiko Risk Defined, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Penegakan integritas, melalui kegiatan penandatanganan komitmen seluruh karyawan, identifikasi benturan kepentingan, penerapan WBS, pengendalian gratifikasi
2. Penegakan nilai etika pegawai, melalui kegiatan monev disiplin pegawai, penilaian 360, dan monev IP ASN. Sampai triwulan II 2025, tidak pernah ditemukan pelanggaran disiplin dan kode etik
3. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh kategori risiko sesuai pedoman manajemen risiko Badan POM dan melakukan pelaporan kepada inspektorat BPOM tepat waktu
4. Melakukan penetapan SKP pegawai tahun 2025 yang sudah terintegrasi dengan data identifikasi manajemen risiko unit kerja

IKU 22. Presentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target,

realisasi, persentase capaian dihitung TW III dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW II tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
22.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	76,19	101,59	Sangat baik 

Tabel 3.86 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III tahun 2025 adalah 76,19%, sedangkan untuk capaiannya adalah 101,59% dari target 75%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya (TW II tahun 2025)

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW II 2025	GAP
22.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	76,19%	52,38%	23,81%

Tabel 3.87 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Terdapat peningkatan realisasi pada IKU ini karena ada terdapat penambahan laporan yang dibuat dan dikirim sesuai jadwal/*timeline* nya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Capaian kinerja atas realisasi kinerja TW III terhadap target Tahun 2025 indikator ini adalah 76,19%. dengan realisasi sd TW III adalah 76,19% dan target tahunan adalah 100%.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
22.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	76,19	76,19	Akan tercapai 

Tabel 3.88 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT TW III dibandingkan target 2025

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan.

Penyebab tercapainya pada triwulan III adalah adanya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan perencanaan..

Langkah-langkah / upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan :

- Pelaksanaan monitoring absensi pegawai melalui aplikasi e-presensi tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulan serta mengirimkan laporan terkait pelanggaran disiplin pegawai secara tepat waktu
- Membuat dan mengirimkan laporan lainnya secara tepat waktu misalnya laporan benturan kepentingan, laporan kinerja, dan lain-lain.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Pelaporan hukuman disiplin pegawai dan pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi yang telah difasilitasi dengan adanya aplikasi pelaporan terkait hukuman disiplin ataupun pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,73%	Telah dilakukan perencanaan ulang target sampel sebagai tindak lanjut dari relaksasi anggaran.	Melakukan kegiatan sampling pada periode bulan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.	Juli 2025	Melakukan kegiatan sampling pada periode bulan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.	-	-	
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	116,38 %	Telah dilakukan perencanaan ulang target sampel sebagai tindak lanjut dari relaksasi anggaran.	Melakukan kegiatan sampling pada periode bulan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.	Juli 2025	Melakukan kegiatan sampling pada periode bulan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.	-	-	
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,0%	Tidak ada peristiwa KLB di wilayah kerja UPT	Monitong kejadian KLB yang ada di wilayah UPT	Juli 2025	Monitong kejadian KLB yang ada di wilayah UPT	-	-	
			Terdapat kasus dugaan KLB pada TW III. Terdapat sampel KLB yang diterima namun tidak dilakukan uji oleh UPT dikarenakan sampel bukan ruang lingkup yang dapat di uji BPOM.	Berkoodinasi dengan Dinas setempat untuk selanjutnya terkait sampel MBG yang dikirimkan adalah sampel produk pangan	Desember 2025	-	Berkoodinasi dengan Dinas setempat untuk selanjutnya terkait sampel MBG yang dikirimkan adalah sampel produk pangan	Desember 2025	-

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,20 %	Telah dilakukan perencanaan ulang target sampel sebagai tindak lanjut dari relaksasi anggaran. Seluruh sampel telah disampling.	Melakukan monitoring terhadap hasil pengujian	Juli 2025	Melakukan monitoring terhadap hasil pengujian	-	-	
5	Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,57	Telah diterbitkan revisi capaian persentase terbaru dari manual Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang di tindaklanjuti stakeholder yang diusulkan	Meningkatkan Advokasi dan Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Pelaku Usaha untuk lebih meningkatkan capaian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	Juli 2025	Advokasi dan Koordinasi telah dilakukan di 2 kabupaten kota yaitu kota pagar alam dan kabupaten empat lawang.	Melakukan Advokasi dan Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Pelaku Usaha di wilayah kabupaten kota yang belum dilakukan		
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89	Telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan perencanaan setelah adanya relaksasi	Konsisten dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan sesudah adanya relaksasi anggaran	Oktober 2025	Tekah dilakukan penyesuaian kembali target dari semula efisiensi menjadi target setelah relaksasi.	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan sesudah adanya relaksasi anggaran	Desember 2025	

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
			anggaran						
7	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	109,79	Telah dilakukan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan menyesuaikan dengan anggaran yang telah dilakukan relaksasi dengan melakukan penyesuaian pelaksanaan pengawasan iklan secara offline	Mengalihkan target iklan media penyiaran lokal ke media lain seperti TV Nasional	Oktober 2025	Tekah dilakukan penyesuaian kembali target dari semula efisiensi menjadi target setelah relaksasi.	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan sesudah adanya relaksasi anggaran	Desember 2025	
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107,35	Telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan setelah adanya relaksasi anggaran	Konsisten dalam melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan sesudah adanya relaksasi anggaran	Oktober 2025	Telah dilakukan penyesuaian kembali target dari semula efisiensi menjadi target setelah relaksasi.	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan sesudah adanya relaksasi anggaran	Desember 2025	
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	109,89	Telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan	Konsisten dalam melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan pedoman	Juli 2025	Tekah dilakukan penyesuaian kembali target dari semula efisiensi menjadi target	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan sesudah adanya relaksasi anggaran	Desember 2025	

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
	sesuai ketentuan		sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan perencanaan setelah adanya relaksasi anggaran	dan rencana pelaksanaan sesudah adanya relaksasi anggaran		setelah relaksasi.			
10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100%	Melakukan kegiatan pemenuhan SKL TW II dengan menyesuaikan relaksasi anggaran dan persediaan yang ada.	Melakukan kegiatan pemenuhan SKL TW II dengan menyesuaikan relaksasi anggaran dan persediaan yang ada.	Juli 2025	Melakukan kegiatan pemenuhan SKL TW II dengan menyesuaikan relaksasi anggaran dan persediaan yang ada.	-	-	
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	105.16 %	IKU baru diterbitkan pada TW III	Melakukan monitoring terhadap IKU sesuai dengan manual terbaru	Oktober 2025	-	Melakukan monitoring terhadap IKU sesuai dengan manual terbaru	Oktober 2025	
12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	Belum seluruh OPD menunjukkan komitmen dalam pengumpulan data dukung untuk pengisian tools penilaian mandiri KKPA	Berkoordinasi dengan PIC pengisian tools KKPA	September 2025	Telah dilaksanakan koordinasi dan pendampingan oleh petugas UPT kepada PIC KKPA Kota Lubuk Linggau	-	September 2025	Kegiatan pendampingan KKPA telah dilaksanakan dengan mendapatkan nilai akhir verifikasi UPT yaitu 69,10
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	0	IKU baru diterbitkan pada	Pelaksanaan Penggunaan tools pengawasan AMR dan	Oktober 2025	Pelaksanaan Bimtek dan advokasi telah	Pelaksanaan Penggunaan tools pengawasan AMR dan publikasi Triwulan IV serta Kegiatan join	Desember 2025	

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
	di wilayah UPT		TW III	publikasi Triwulan IV serta Kegiatan join inspection		selesai dilaksanakan pada TW III	inspection		
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,73 %	tingkat efektivitas KIE mendapatkan nilai efektif	agar setiap penerima layanan dapat mengisi survey efektivitas KIE sesuai dengan kondisi audiens	Desember 2025	mendampingi audiens untuk selalu mengisi survey setiap mendapatkan layanan informasi sehingga efektivitas KIE mendapatkan nilai optimal	-	-	-
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100%	Secara capaian terhadap target bulanan, indikator ini tercapai (dengan 1 sekolah) namun untuk jumlah target sapa sekolah tidak berubah yaitu 2 sekolah	berkoordinasi dengan biro perencanaan dan unit pengampu untuk revisi target sapa sekolah menjadi 1 sekolah	September 2025	berkoordinasi dengan biro perencanaan dan unit pengampu untuk revisi target sapa sekolah menjadi 1 sekolah	Menunggu arahan unit pengampu dan biro perencanaan untuk adanya penyesuaian target sapa sekolah menjadi 1 sekolah	Desember 2025	
16	Jumlah desa pangan aman	100%	telah dilaksanakan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan KAK	koordinasi dengan unit pengampu terkait pelaksanaan desa pangan aman sehingga mendapatkan output yang maksimal	Juli 2025	melaksanakan monev pada bulan Agustus 2025 sesuai timeline unit pengampu	-	Agustus 2025	Telah dilaksanakan seluruh rangkaian kegiatan desa pangan aman tahun 2025
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100%	telah dilaksanakan pasar pangan aman berbasis	koordinasi dengan unit pengampu terkait pelaksanaan pasar pangan aman berbasis komunitas sehingga	Juli 2025	melaksanakan monev pada bulan Agustus 2025	-	Juli 2025	Telah dilaksanakan seluruh rangkaian kegiatan

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
			komunitas	mendapatkan output yang maksimal					pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	111,76%	Adanya pemblokiran anggaran	Menunggu arahan pusat terkait ada tidaknya relaksasi anggaran yang diblokir	Desember 2025	1. Pelaksanaan kegiatan bimtek telah dilakukan secara hybrid dan pendampingan umk terkait coaching e-sertifikasi pangan juga dilakukan secara hybrid yaitu dengan pendampingan online dan kunjungan langsung ke sarana. 2. Pendampingan umk terkait coaching izin edar secara hybrid yaitu dengan pendampingan online dan kunjungan langsung ke sarana.	1. Menunggu arahan dari pusat terkait kebijakan pemblokiran 2. Melakukan pembuatan lapran pendampingan UMK Pangan Olahan	-	-
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sedjaan	110%	Belum dilakukan Penindakan dan Penyidikan	Segera untuk dilakukan gelar kasus	TW III	Sudah dilakukan Penindakan, Penyidikan dan Pemberkasan	-	-	-

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		Berkas perkara dalam tahapan P-19 dari Jaksa Penuntut Umum	Perlu dilakukan pemenuhan P-19 dari Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dilakukan proses Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti)	TW IV		Perlu dilakukan pemenuhan P-19 dari Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dilakukan proses Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti)	TW IV	
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100	Melakukan patroli siber setiap bulan serta melaporkan hasil patroli siber dan melaporkan hasil patroli siber	Konsisten dalam melakukan patroli siber dan pelaporan tepat waktu serta menyusun rencana tindaklajut OM dan Menyusun Analisis OM	TW III s.d TW IV	Melakukan patroli siber setiap bulan serta melaporkan hasil patroli siber dan melaporkan hasil patroli siber	1. Menyusun rencana rekomendasi tindaklanjut 2. Menyusun analisis OM	TW III s.d TW IV	Pelaporan hasil patroli siber tepat waktu Telah ditindaklanjuti rekomendasi tindaklanjut oleh UPT Telah diselesaikan nya penyusunan Analisis OM
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun						
22	Nilai AKIP UPT BPOM	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun						
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun						
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun						

NO	Indikator	Capaian tdhp target s/d bln juni(%)	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi akhir
						Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
							Rencana aksi yang belum	Timeline	
25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	101,59	realisasi kegiatan sudah sesuai dengan timeline keigatan/laporan indikator nya	melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline nya	Desember 2025		Membuat laporan disiplin, laporan gratifikasi, laporan kinerja, dan dokumen perjanjian kinerja tepat waktu	Desember 2025	

3.3. Realisasi Anggaran

a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

No	Indikator	Kinerja TW III 2025			Anggaran 2025		
		Target TW III	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75	81.34	100.73	46,622,800	32,882,898	70.53
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	98.92	116.38	21,838,950	12,324,969	56.44
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	4,910,000	-	-
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.57	104.20	21,838,950	12,324,969	56.44
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.00	77.87	85.57	18,961,050	15,863,203	83.66
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	16,435,950	10,830,000	65.89
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	97.42	107.35	53,069,500	29,820,460	56.19
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	58,487,500	26,925,250	46.04
9	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	84.13	105.16	16,261,200	11,556,324	71.07

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Indikator	Kinerja TW III 2025			Anggaran 2025		
		Target TW III	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	18,096,000	15,293,203	84.51
11	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	4,853,100	2,738,882	56.44
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	99.25	109.79	17,028,000	9,390,000	55.14
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.89	10.89	100.00	77,852,000	43,501,200	55.88
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.59	89.82	103.73	131,151,000	19,663,301	14.99
12	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50.00	50.00	100.00	97,985,000	19,463,000	19.86
13	Jumlah desa pangan aman	100.00	100	100.00	160,852,000	19,750,000	12.28
14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100	100.00	105,332,000	13,825,000	13.13
15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.00	95	111.76	12,500,000	2,373,750	18.99
16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50.00	55	110.00	104,303,000	50,340,196	48.26
17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50.00	50	100.00	43,048,000	4,904,838	11.39

No	Indikator	Kinerja TW III 2025			Anggaran 2025		
		Target TW III	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	diselesaikan sesuai standar						
18	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	23,611,000	3,920,000	16.60
19	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	250,739,000	179,231,933	71.48
20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	1,587,437,500	931,926,009	58.71
21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	276,591,000	188,314,541	68.08
22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75.00	76.19	101.59	518,606,500	268,847,899	51.84

Tabel 3.89 Realisasi Anggaran TW III tahun 2025 per indikator

Pada Tabel di atas untuk nilai anggaran yang digunakan adalah *include dengan* pagu blokir anggaran. Dimana pagu awal adalah Rp .3.688.411.000 dengan realisasi Rp 1.926.011.824 dengan capaian 52,22%.

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2025			Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75	81.34	100.73	46,622,800	32,882,898	70.53
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	98.92	116.38	21,838,950	12,324,969	56.44
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100	100.00	4,910,000	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2025			Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.57	104.20	21,838,950	12,324,969	56.44
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.00	77.87	85.57	18,961,050	15,863,203	83.66
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	16,435,950	10,830,000	65.89
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	97.42	107.35	53,069,500	29,820,460	56.19
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	58,487,500	26,925,250	46.04
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	84.13	105.16	16,261,200	11,556,324	71.07
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	18,096,000	15,293,203	84.51
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	4,853,100	2,738,882	56.44

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2025			Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	99.25	109.79	17,028,000	9,390,000	55.14
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.89	10.89	100.00	77,852,000	43,501,200	55.88
SK 1					376,255,000	223,451,357	59.39
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.59	89.82	103.73	131,151,000	19,663,301	14.99
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50.00	50.00	100.00	97,985,000	19,463,000	19.86
	Jumlah desa pangan aman	100.00	100	100.00	160,852,000	19,750,000	12.28
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100	100.00	105,332,000	13,825,000	13.13
SK 3					495,320,000	72,701,301	14.68
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.00	95	111.76	12,500,000	2,373,750	18.99
SK 4					Rp 12.500.000	Rp 2.373.750	18,99%

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2025			Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50.00	55	110.00	104,303,000	50,340,196	48.26
SK 5					104,303,000	50,340,196	48.26
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00 %	43,048,000	4,904,838	11.39
SK 6					43,048,000	4,904,838	11.39
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0.00%	Rp 23.611.000	Rp 3.920.000	16,6%
SK 7					Rp 23.611.000	Rp 3.920.000	16,6%
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0.00%	250,739,000	179,231,933	71.48
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0.00%	1,587,437,500	931,926,009	58.71
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0.00%	276,591,000	188,314,541	68.08
	Persentase implementasi	75.00	76.19	101.59	518,606,500	268,847,899	51.84
	rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT						
SK 8					2,633,374,000	1,568,320,382	59.56

Tabel 3.90 Realisasi Anggaran TW III tahun 2025 per sasaran kegiatan

Data Pagu anggaran yang digunakan adalah pagu anggaran *include* pagu blokir

c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Analisis Efisiensi

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut

$$IE = \% \text{capaian output} / \% \text{capaian input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

- Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidak efisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)

3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di kota Lubuklinggau pada triwulan III tahun 2025 berdasarkan target output/kegiatan sebagai berikut :

IK	Kinerja TW III			Anggaran TW III			IE	SE	TE	Keter
	Targ et	Relis asi	%	Realisas i	Pagu sd TW II	% atas pag u rpd tw II				
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75	81.34	100.73	32,882,898	19,765,720.80	166.36	0.61	1.00	(0.39)	Tidak efisien
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	98.92	116.38	12,324,969	9,669,288.15	127.47	0.91	1.00	(0.09)	Tidak efisien
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai	100.00	100	100.00	-	1,268,859.00	-	-	1.00	(1.00)	Tidak efisien

standar oleh UPT										
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.57	104.20	12,324,969	9,669,288.15	127.47	0.82	1.00	(0.18)	Efisien 88%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.00	77.87	85.57	15,863,203	2,223,420.45	713.46	0.12	1.00	(0.88)	Tidak efisien
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	10,830,000	12,882,949.05	84.06	1.31	1.00	0.31	Efisien 95%
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	97.42	107.35	29,820,460	18,279,213.00	163.14	0.66	1.00	(0.34)	Tidak efisien
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	26,925,250	37,101,934.00	72.57	1.51	1.00	0.51	Efisien 92%
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	80.00	84.13	105.16	11,556,324	8,471,023.20	136.42	0.77	1.00	(0.23)	Tidak efisien

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TAHUN 2025

diawasi sesuai standar										
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	15,293,203	1,545,370.50	989.61	-	1.00	(1.00)	Tidak efisien
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	2,738,882	2,148,730.70	127.47	-	1.00	(1.00)	Tidak efisien
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.40	99.25	109.79	9,390,000	8,574,243.00	109.51	1.00	1.00	0.00	Efisien 100%
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.89	10.89	100.00	43,501,200	58,336,737.00	74.57	1.34	1.00	0.34	Efisien 95%
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.59	89.82	103.73	19,663,301	20,509,980.00	95.87	1.08	1.00	0.08	Efisien 100%
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	50.00	50.00	100.00	19,463,000	18,619,080.00	104.53	0.96	1.00	(0.04)	Tidak efisien
Jumlah desa pangan aman	100.00	100	100.00	19,750,000	20,750,140.00	95.18	1.05	1.00	0.05	Efisien 100%
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100	100.00	13,825,000	12,500,000.00	110.60	0.90	1.00	(0.10)	Tidak efisien

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.00	95	111.76	2,373,750	2,380,000.00	99.74	1.12	1.00	0.12	Efisien 100%
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50.00	55	110.00	50,340,196	47,003,981.00	107.10	1.03	1.00	0.03	Efisien 100%
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50	100.00	4,904,838	4,064,835.00	120.67	0.83	1.00	(0.17)	Tidak efisien
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	3,920,000	5,479,996.00	71.53	-	1.00	(1.00)	Tidak dinilai
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	179,231,933	178,004,063.60	100.69	-	1.00	(1.00)	Tidak dinilai
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	931,926,009	983,085,686.40	94.80	-	1.00	(1.00)	Tidak dinilai
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	188,314,541	187,086,671.60	100.66	-	1.00	(1.00)	Tidak dinilai
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75.00	76.19	101.59	268,847,899	267,006,095.40	100.69	1.01	1.00	0.01	Efisien 100%

Tabel 3.91 Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja

Dari tabel di atas terdapat 10 indikator pada pengukuran tingkat efisiensinya masuk kategori efisien. Adapun 5 indikator tidak masuk perhitungan tingkat efisiensi karena penilaian kinerja dilakukan pada TW IV sehingga kinerja belum diperhitungkan. 10 Indikator kinerja masuk kategori tidak efisien karena belum tercapainya target kinerja pada TW III serta pagu anggaran menggunakan rencana penarikan dana. Dimana terdapat realisasi anggaran yang melebihi atau kurang dari rencana penarikan dana sehingga mempengaruhi perhitungan tingkat efisiensi diantaranya seperti indikator kegiatan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dan sisa indikator lainnya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas yaitu :

- Melakukan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan;
- Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan;
- Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin;
- Melakukan rapat monev kinerja dan anggaran setiap bulannya;
- Melakukan revisi POK/DIPA dalam hal percepatan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang mencakup 6 wilayah kerja yaitu Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat dan Kota Pagar Alam, dalam mencapai tujuan/ Sasaran Kegiatan sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM, sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2025 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, Sasaran Kegiatan dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan III tahun 2025. Adapun kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja kegiatan diantaranya terbatas nya sumber daya manusia karena bertambahnya *catchment area* pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Kota Pagar Alam pada tahun 2024, sehingga diperlukan perhitungan ulang ABK untuk pengusulan penambahan SDM di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sarana dan Prasarana yang belum memadai, sehingga akan dilakukan perencanaan pembangunan gedung kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Dalam rangka efisiensi anggaran sesuai dengan Inpress Nomor 1 Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan optimalisasi kegiatan pada beberapa indikator kinerja, dan strategi yang telah dilakukan pada triwulan pertama yaitu dengan mengalihkan kegiatan pada indikator kinerja yang semula dari luring menjadi daring dan mengalihkan kegiatan dilakukan di dalam kota.

Terdapat indikator yang dilakukan normalisasi capaian sesuai dengan Surat Edaran Nomor. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 dimana indikator dengan capaian >110,00% dilakukan normalisasi yaitu untuk indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **110,00%** (sebelum normalisasi capaian 116.36%), Hal ini disebabkan karena adanya perubahan target terkait presentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dari TW sebelumnya. Sehingga strategi yang digunakan yaitu melaksanakan sampling makanan sesuai dengan pedoman untuk mengatasi kendala tersebut yaitu telah dilakukan penyesuaian kembali target pada tahun 2026 dan melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman.

Pada triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau memperoleh Nilai Kinerja Organisasi dengan rincian masing masing sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan target pertama yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **103,87%** dan predikat “**Istimewa**”.
2. Sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **100,93%** dan predikat “**Istimewa**”.
3. sasaran kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **110,00%** dengan predikat “**Istimewa**”
4. sasaran kegiatan keempat yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **110,00%** dengan predikat “**Istimewa**”
5. sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja

UPT” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **100,00%** dengan predikat **“Baik”**.

6. sasaran kegiatan keenam yaitu Layanan Publik UPT yang prima” dengan 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT yang belum dapat dihitung di TW III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV
7. sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **101,59%** dengan predikat **“Istimewa”**

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada TW III tahun 2025 sebesar **52,20%** yaitu **Rp. 1.926.011.724,-** dari **Rp. 3.688.411.000,-**. Anggaran Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) sasaran kegiatan.

4.2. Saran

Dalam mengatasi kekurangan dan memaksimalkan capaian di tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau akan lebih memperhatikan setiap target kegiatan dan RPD setiap bulannya sehingga dapat mencapai kinerja yang efisien. Monitoring secara periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator tahun berikutnya dapat tercapai, Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO 9001:2015.